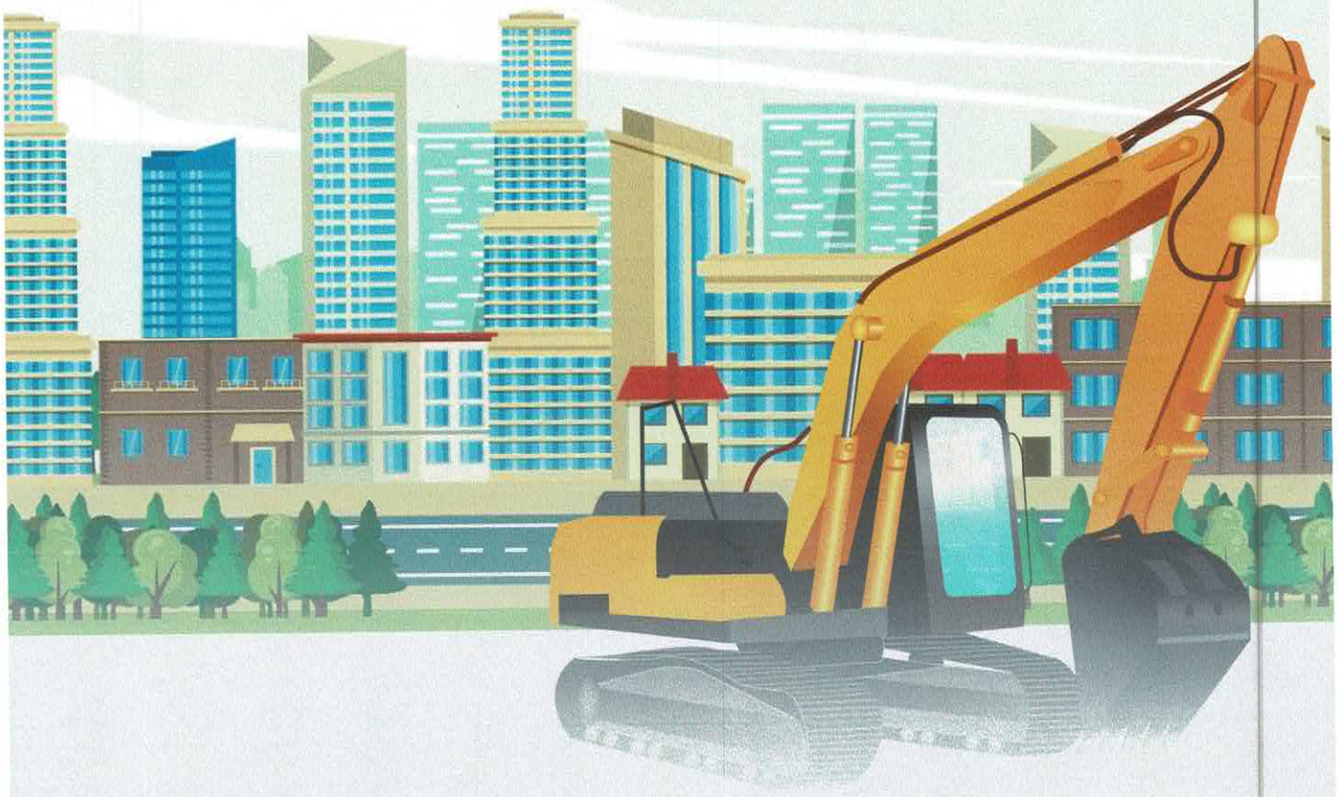
PUPR
KABUPATEN NGANJUK



RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2025-2029

pupr@nganjukkab.go.id puprnganjuk pupr.nganjukkab.go.id

DAFTAR ISI

SAMPUL
DAFTAR ISI i
KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ..... I - 1
1.2. Landasan Hukum ..... I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I – 6
1.4. Sistematika Penulisan ..... I – 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Gambaran Pelayanan
a. Tugas, Fungsi dan Struktur..... II – 9
b. Sumber Daya .... II – 13
c. Kinerja Pelayanan .... II – 25
d. Kelompok Sasaran Layanan ..... II – 53
e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan. ..... II – 53
f. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja ..... II – 54
g. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab ..... II - 54
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis
a. Permasalahan Pelayanan .... II – 54
b. Perumusan Isu Strategis..... II - 64

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 ..... III-70
3.2. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029..... III-73
3.3. Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra..... ..... III-83

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Uraian Program, Kegiatan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif IV-94
4.2. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... IV-144

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)..... IV-148
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci..... IV-151

BAB V PENUTUP
5.1 Penutup..... V – 153

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk ini dapat diselesaikan.

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif yang dapat direvisi bila diperlukan.

Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan sebagai dasar evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk pada periode 2025-2029.

Didalam penyusunan Renstra SKPD ini telah diselaraskan antara Renstra SKPD dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

sehingga diharapkan tercipta harmonisasi dan sinergi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau Kementerian dengan SKPD Provinsi, sehingga diharapkan ada keterpaduan langkah-langkah didalam pembangunan.

Akhirnya, kami berharap agar seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dapat diimplementasikan untuk mensukseskan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang lebih luas lagi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi upaya kita didalam melaksanakan pembangunan. Amin.

Nganjuk, 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Nganjuk

ONNY SUPRIYONO, ST., M.M
Pembina / IVa
NIP. 19780426 200901 1 007



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

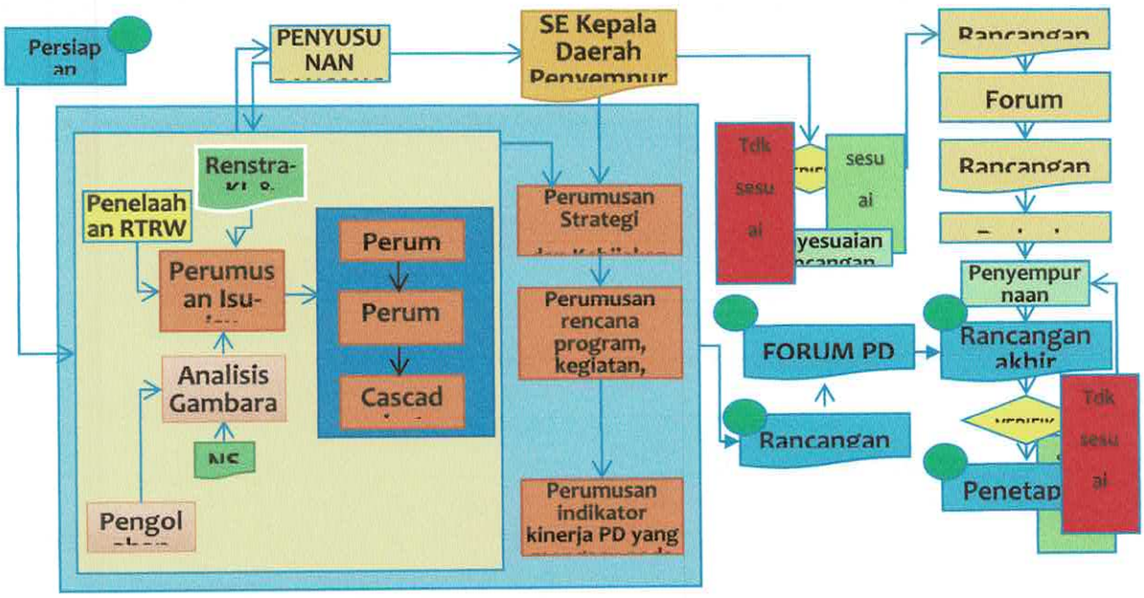
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka seluruh Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2024; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, dan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi. Kemudian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 No. 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 TUGAS POKOK

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2.1.2 FUNGSI

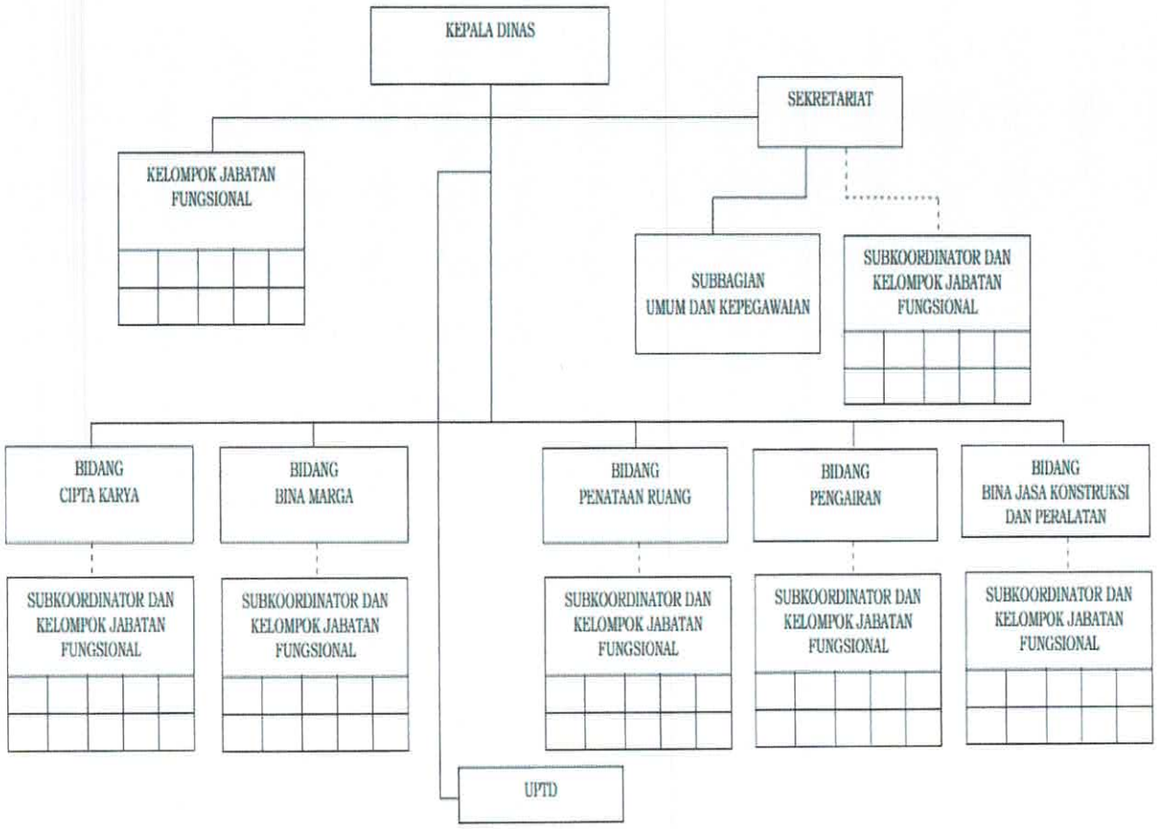
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN XVII PERATURAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2022



KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;

4. pembinaan aparatur;
5. pengelolaan urusan kepegawaian;
6. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
8. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. melaksanakan urusan persuratan;
2. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya. Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum cipta karya;
2. pengelolaan dan pembangunan gedung negara dan fasilitas umum;
3. pelaksanaan pengawasan dan penertiban serta pengendalian pembangunan gedung dan fasilitas umum;
4. pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Daerah;
6. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum bina marga. Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum bina marga;
2. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum bina marga; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan ruang;
2. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum cipta karya meliputi pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan tata bangunan gedung negara dan fasilitas umum, rencana detail dan rencana teknik tata ruang kawasan termasuk penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL);
3. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan lokasi PKL;
4. penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rincian Tata Ruang (RRTR) Kabupaten;
5. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.

e. Bidang Pengairan

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan sumber daya air dan irigasi. Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air dan irigasi;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sumber daya air dan irigasi;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air dan irigasi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.

f. Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan

Bidang Jasa Kontruksi dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang bina jasa konstruksi, dan peralatan. Bidang Jasa Kontruksi Dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina jasa konstruksi, peralatan, pengujian bahan dan konstruksi;
2. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina jasa konstruksi, peralatan, pengujian bahan dan konstruksi, termasuk pembinaan terhadap penyedia jasa, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang jasa konstruksi, peralatan, pengujian bahan dan konstruksi;
3. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, peralatan, pengujian bahan dan konstruksi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

c. 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Nganjuk sebanyak 145 orang (per Juli 2025). Data pegawai menurut Golongan dan Jabatan adalah

Tabel 2.1
Data Administrasi Kepegawaian
Menurut Golongan dan Jabatan

U R A I A N	Satuan	Jumlah
a. Jumlah PNS		
1) Golongan I	Orang	**1**
2) Golongan II	Orang	**36**
3) Golongan III	Orang	**103**
4) Golongan IV	Orang	**5**
Jumlah	**Orang**	**145**
b Jumlah Pejabat Struktural		
1) Eselon II	Orang	**1**
2) Eselon III	Orang	**5**
3) Eselon IV	Orang	**18**
c. Jumlah Pejabat Fungsional	Orang	**12**
d. Jumlah Staf PNS	Orang	**109**
Jumlah	**Orang**	**145**

Sumber : DUK DPUPR per Juli 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah tenaga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk yang berstatus ASN pada akhir bulan Juli tahun 2025 sebanyak 145 orang. Dilihat dari segi kuantitas pegawai masih dikatakan kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ditangani, sehingga perlu adanya tambahan tenaga dan peningkatan kemampuan Sumber daya manusia melalui diklat teknis fungsional dan diklat lain yang mendukung pengembangan organisasi.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas sampai dengan tahun 2025 sarana prasarana dimaksud meliputi komponen :

1. Alat-alat besar sejumlah 3 9 unit dengan kondisi Baik 100 %, Rusak Sedang 0 %, Rusak Berat 0%.
2. Alat-alat Angkutan sejumlah 80 unit dengan kondisi Baik 85,00 %, Rusak Sedang 15,00 %, Rusak Berat 0%.
3. Alat Bengkel dan Alat Ukur sejumlah 26 buah dengan kondisi Baik 96,15 %, Rusak Sedang 3,84 %, Rusak Berat 0%.
4. Alat Kantor dan Rumah Tangga sejumlah 774 buah dengan kondisi Baik 86,56 %, Rusak Sedang 10,85 %, Rusak Berat 2,58 %.
5. Alat Studio dan Alat Komunikasi sejumlah 87 buah dengan kondisi Baik 95,41 %, Rusak Sedang 4,59 %, Rusak Berat 0 %.
6. Alat Laboratorium sejumlah 133 unit dengan kondisi Baik 35,34 %, Rusak Sedang 16,54 %, Rusak Berat 35,34 %.

Secara keseluruhan, daftar aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Daftar Aset Tetap Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Menunjang Terhadap Upaya Pencapaian Sasaran s/d Tahun 2025

No.	Nama Aset/Th. Perolehan	Jumlah	Kondisi Eksisting (Jumlah)		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
I	**ALAT-ALAT BESAR**				
1	Mesin Gilas Walles th. 1974	1	1		
2	Mesin Gilas Walles th. 1977	3	3		
3	Mesin Gilas Walles th. 1981	1	1		
4	Mesin Gilas Walles th. 1982	2	2		
5	Mesin Gilas Walles th. 1983	1	1		
6	Mesin Gilas Baby Roller th. 1995	1	1		
7	Mesin Gilas Walles th. 2001	2	2		
8	Mesin Gilas Walles th. 2003	2	2		
9	Mesin Gilas Walles th. 2005	1	1		
10	Mesin Gilas Walles th. 2006	1	1		

No.	Nama Aset/Th. Perolehan	Jumlah	Kondisi Eksisting (Jumlah)		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
11	Excavator th. 2006	1	1		
12	Mesin Gilas Walles th. 2007	6	6		
13	Mesin Gilas Vibrator th. 2007	1	1		
14	Mesin Gilas Vibrator th. 2011	1	1		
15	Mesin Gilas Vibrator th. 2018	1	1		
16	Mesin Gilas Baby Roller th. 2020	5	5		
17	Excavator th. 2021	1	1		
18	Mesin Gilas Vibrator th. 2021	1	1		
19	Mesin Gilas Vibrator th. 2022	2	2		
20	Excavator th. 2022	1	1		
21	Excavator th. 2023	1	1		
22	Mesin Gilas Vibrator th. 2023	2	2		
23	Excavator th. 2024	1	1		
Jumlah		**39**	**39**	**0**	**0**
% kondisi peralatan		**100**	**100**	**0**	**0**

Sumber : Aset DPUPR Tahun 2025

No.	Nama Aset/Th. Perolehan	Jumlah	Kondisi Eksisting (Jumlah)		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
II.	**ALAT-ALAT ANGKUTAN**				
1	TOYOTA KJG KF20 PICK UP th. 1986	1		1	
2	Honda MCB Win th. 1991	4		4	
3	Toyota Kijang th. 1993	1		1	
4	KIA CERES th. 1994	1		1	
5	ISUZU TLD56 th. 1995	1		1	
6	HONDA C 800 M th. 1995	1		1	

No.	Nama Aset/Th. Perolehan	Jumlah	Kondisi Eksisting (Jumlah)		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
7	HONDA MCB WIN th. 1997	1		1	
8	BEIJING BJ 1005 th. 2000	1		1	
9	Toyota/Kijang Innova 2005	1	1		
10	Mega Pro	2	2		
11	TOYOTA DYNA 110 ET th. 2010	2	2		
12	Honda New Megapro 150 th. 2010	1	1		
13	APV MEGA CARRY EXTRA WIDE th. 2013	1	1		
14	Isuzu Panther th. 2013	3	3		
15	SUZUKI PIC UP st 150	3	3		
16	KAWASAKI KLX 150 th. 2013	2	2		
17	Honda vario th. 2013	2	2		
18	Honda Supra 125 th. 2014	5	5		
19	Honda Verza th. 2014	5	5		
20	Honda Vario Techno CBS th. 2014	1	1		
21	Toyota Rush th. 2016	1	1		
22	Honda Revo CW th. 2016	1	1		
23	Honda Versa CW th. 2016	6	6		
24	TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1 th. 2017	2	2		
25	Honda CB150R th. 2017	2	2		
26	Vario 150 th. 2017	4	4		
27	SUZUKI APV PICK UP WD th. 2018	4	4		

No.	Nama Aset/Th. Perolehan	Jumlah	Kondisi Eksisting (Jumlah)		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
28	X-PANDER th. 2019	3	3		
29	New Carry PU th. 2019	1	1		
30	YAMAHA JUPITER Z CW FI VIN th. 2019	5	5		
31	VIAR V 20 RL M/T th. 2019	1		1	
32	HINO TRONTON SELF LOADER th. 2021	1	1		
33	VIAR th. 2021	5	5		
34	HINO 300 th. 2024	1	1		
35	GEROBAK SAMPAH	4	4		
Jumlah		**80**	**68**	**12**	**0**
% kondisi peralatan		**100**	**85**	**15**	**0**

Sumber : Aset DPUPR Tahun 2025

No.	Nama Aset/Th. Perolehan	Jumlah	Kondisi Eksisting (Jumlah)		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
III	**ALAT-ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**				
1	Mata Bor Core drill th. 2016	1		1	
2	Bak Air Th. 2019	5	5		
3	CHAINSHOW STIL MS 382 th. 2023	1	1		
4	Tool kit set th. 2023	1	1		
5	MESIN LAS LISTRIK th. 2024	2	2		
6	STEAM CLEANER th. 2024	1	1		
7	GERGAJI CHAINSAW th. 2024	7	7		
8	LAS LISTRIK th. 2024	2	2		

9	DIAL INDICATOR th. 2024	2	2		
10	MANOMETER th. 2024	2	2		
11	PLATFORM SCALE DIGITAL	1	1		
12	DIGITAL BALANCE	1	1		
Jumlah		**26**	**25**	**1**	**0**
% kondisi peralatan		**100**	**96,15**	**3,84**	**0**

Sumber : Aset DPUPR Tahun 2025

IV	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**	**Jumlah**	**Kondisi Eksisting (Jumlah)**		
			Baik	**Rusak Sedang**	**Rusak Berat**
1	A.C. SPLIT th. 2016-2023	17	14	3	
2	EPSON EB-X400 th. 2019	1	1		
3	Box PC th. 2019	1	1		
4	SPEAKER th. 2022	1	1		
5	Papan Pengumuman th. 2014	70		50	20
6	AC STAND th. 2021	3	3		
7	AC UNIT th. 2011-2024	23	20	3	
8	FREEZER th. 2023	2	2		
9	ALAT PENGHANCUR KERTAS th. 2017-2023	14	12	2	
10	FILLING CABINET th. 2024	6	6		
11	RAK ARSIP th. 2022	30	30		
12	TEMPAT SAMPAH th. 2019	20	20		
13	ALMARI DIALYSER th. 2024	4	4		
14	BRANDKAS th. 2005-2007	2	2		
15	BUFFET KAYU th. 1998	1	1		
16	CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM th. 2024	5	5		
17	DISPENSER th. 2022	3	3		
18	DRONE th. 2024	2	2		

IV	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Jumlah	Kondisi Eksisting (Jumlah)		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
19	FILING CABINET BESI th. 2001-2022	24	22	2	
20	FILING CABINET KAYU th. 2013	2	2		
21	GENSET KAPASITAS KECIL th 2023	1	1		
22	KURSI KERJA PEJABAT th. 2022	17	17		
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon II th. 2011-2014	3	3		
24	KURSI PUTAR th. 2010-2013	3		3	
25	KURSI RAPAT th. 2010-2023	36	35	1	
26	KURSI TAMU th. 2001-2008	2		2	
27	LEMARI ARSIP th. 2013-2021	31	31		
28	LOUDSPEAKER th. 2024	1	1		
29	Meja Kerja Pejabat th. 2016	2	2		
30	MEJA RAPAT th. 2010- 2022	3	3		
31	MESIN ABSENSI th. 2016	1	1		
32	Canon Image Runner 2520 th. 2016	1	1		
33	MESIN PEMOTONG RUMPUT th. 2019-2024	43	43		
34	MEJA KAYU / ROTAN th. 1980-2010	4	4		
35	MEJA TULIS th. 2011	3	3		
36	RAK KAYU th. 2024	10	10		
37	PAPAN PENGUMUMAN th. 2015-2023	298	280	18	
38	RAK BESI th. 2015-2023	37	37		

IV	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Jumlah	Kondisi Eksisting (Jumlah)		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
39	RAK KAYU th. 2012	22	22		
40	SOFA th. 2013-2021	2	2		
41	SOUND SYSTEM th. 2012-2014	2	2		
42	TANGGA ALUMINIUM th. 2024	1	1		
43	TELEVISI th. 2012-2022	9	9		
44	TANDON AIR th. 2024	2	2		
45	TROLLEY th. 2019	5	5		
46	UNIT POWER SUPPLY th. 2015-2022	4	4		
Jumlah		**774**	**670**	**84**	**20**
% kondisi peralatan		**100**	**86,56**	**10,85**	**2,58**

Sumber : Aset DPUPR Tahun 2025

V	ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	Jumlah	Kondisi Eksisting (Jumlah)		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	ALAT PEMANAS PROSESING th. 2017	4	4		
2	FACSIMILE th. 2016	1		1	
3	HANDY TALKY (HT) th. 2024	65	65		
4	LCD MONITOR th. 2023	6	6		
5	ADAPTOR INTERCOM th. 2013	1		1	
6	CAMERA + ATTACHMENT th. 2017-2019	6	5	1	
7	PROYEKTOR + ATTACHMENT th. 2015	1		1	

V	ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	Jumlah	Kondisi Eksisting (Jumlah)		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
8	Power Supply th. 2018	1	1		
9	PROFESSIONAL SOUND SYSTEM th. 2018	1	1		
10	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) th. 2016	1	1		
Jumlah		**87**	**83**	**4**	**0**
% kondisi peralatan		**100**	**95,41**	**4,59**	**0**

Sumber : Aset DPUPR Tahun 2025

VI	ALAT-ALAT LABORATORIUM	Jumlah	Kondisi Eksisting (Jumlah)		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	HAND PENETROMETER Th. 2012	1			1
2	Absorption Of Fine Agregate Th. 2014	1			1
3	Bulk Density Test Th. 2014	1			1
4	Claveland Electric Th. 2014	1			1
5	Ductility Aspalt Th. 2014	1			1
6	Hot Plate 220 Volt Th. 2014	1			1
7	Loss On Heating Th. 2014	1			1
8	Plunger Rod Sondir Th. 2014	1			1
9	Sample Splitter Th. 2014	1			1
10	Saybolt Viscometer Th. 2014	1			1
11	Softening Point Test Th. 2014	1			1
12	Sounding Rod Sondir Th. 2014	1			1
13	Soundnes Test Th. 2014	1			1
14	Spesific Gratify Aspal Th. 2014	1			1
15	Core Drill Th. 2015	1			1
16	Field CBR Test Set Th. 2015	1			1

VI	ALAT-ALAT LABORATORIUM	Jumlah	Kondisi Eksisting (Jumlah)		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
17	Laboratory Concreate Th. 2015Mixer	1			1
18	Lenght Gauge Th. 2015	1			1
19	Mortar Test Set Th. 2015	1			1
20	Sample Splitter Th. 2015	1			1
21	Sentrifuge Extractor Th. 2015	1			1
22	Thickness Gauge Th. 2015	1			1
23	Calibration Anvil Th. 2016	1		1	
24	Hidrolic Pump Compression Testing Machine Th. 2016	1		1	
25	Raubber Capping Pad Th. 2016	1		1	
26	Sample Extrader Th. 2016	1		1	
27	Spesimen Cuting Machine Th. 2016	1		1	
28	Standart Colourt Chart Th. 2016	1		1	
29	Vertical Silinder Capping Set Th. 2016	1		1	
30	Electronic Balance 30 Kgf Th. 2016	2		2	
31	Konus Sondir Th. 2016	2		2	
32	Straight Edge Th. 2017	1		1	
33	Concrete Hammer Test Th. 2017	1		1	
34	Agregat Impact Test Set Th. 2017	1		1	
35	Combination Permeameter	1		1	
36	Karbit Speedy Test Th. 2017	1		1	
37	Lamp Charge Th. 2017	1		1	
38	Modulus Elasticity Concre Th. 2017	1		1	
39	Reflux Th. 2017	1		1	

VI	ALAT-ALAT LABORATORIUM	Jumlah	Kondisi Eksisting (Jumlah)		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
40	Spesific Gravity Hydrauli Th. 2017	1		1	
41	Time Setting Of Hydraulic Th. 2017	1		1	
42	Water In Bitominous Mater Th. 2017	1		1	
43	Gliserin Cair Th. 2017	2		2	
44	Cetakan Kubus Th. 2017	5		5	
45	Cetakan Silinder Th. 2017	5		5	
46	Sand Cone Test Set Th. 2017	5		5	
47	Stick Sondir Th. 2017	8		8	
48	Hydrometer Analysis Test Th. 2017	1	1		
49	Air Permeability Of Perla Th. 2017	1	1		
50	Speedy Moisture Tester Th. 2017	1	1		
51	Core Drill Beton Th. 2018	1	1		
52	Cutter Aspalt Concrete Th. 2018	1	1		
53	Hand Bor Electric Th. 2018	1	1		
54	Manometer Th. 2018	1	1		
55	Mata Bor Core Drill Th. 2018	1	1		
56	Reflux Th. 2018	1	1		
57	Cetakan Kubus Th. 2018	8	8		
58	Cetakan Silinder Th. 2018	8	8		
59	Slump Test Set Th. 2019	2	2		
60	Rubber Capping Pad Th. 2019	2	2		
61	Sieve Analysis Th. 2019	2	2		
62	Spesific Gravity & Absorption Test Set Th. 2019	1	1		
63	Cetakan Kubus Pabrikasi Th. 2019	7	7		
64	Cetakan Silinder Pabrikasi Th. 2019	7	7		

VI	ALAT-ALAT LABORATORIUM	Jumlah	Kondisi Eksisting (Jumlah)		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
65	DIGITAL COMPRESION MACHINE Th. 2020	1	1		
66	Universal Testing Machine Th. 2021	1	1		
67	FIELD CBR Test Th. 2022	1	1		
68	CORE DRILING TEST Th. 2022	1	1		
69	Hydraolic Concrete Beam Th. 2022	1	1		
70	ELEKTRIK STRENGTH UJI TARIK BETON th. 2023	2	2		
71	ELECTRIC CBR LABORATORY TEST SET th. 2023	1	1		
72	MARSHAAL COMPRESION TEST SET + AUTOMATIC COMPACTOR th. 2023	1	1		
73	KATROL th. 2023-2024	3	3		
74	DIGITAL BALANCE th. 2023	2	2		
75	MORTAR MIXER ASTM C305 th. 2024	1	1		
76	HIDROLIS PRESS BETON th. 772024	2	2		
77	DIGITAL SPECIFIC GRAVITY th. 2024	1	1		
Jumlah		**133**	**64**	**47**	**22**
% kondisi peralatan		**100**	**35,34**	**16,54**	**35,34**

Sumber : Aset DPUPR Tahun 2025

c. KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pembangunan Infrastruktur jalan, irigasi, SPAM, Sanitasi dan pemanfaatan lahan sesuai rencana tata ruang di Kabupaten Nganjuk merupakan bagian dari proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk dan juga merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Infrastruktur di bidang jalan, jembatan, irigasi dan bangunan pelayanan publik serta pemanfaatan lahan sesuai rencana tata ruang merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Nganjuk dan peningkatan

daya saing daerah, disamping sektor lain seperti produk unggulan pertanian, sektor perdagangan dan sektor wisata. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan bangunan pelayanan publik serta pemanfaatan lahan sesuai rencana tata ruang yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi, meningkatan minat investor untuk membuka industri baru yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan bangunan pelayanan publik serta pemanfaatan lahan sesuai rencana tata ruang mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil.

Disamping itu, Pembangunan di bidang Bina Marga, bidang Pengairan, bidang Penataan Ruang, bidang Cipta Karya serta bidang Bina Jasa Kontruksi dan Peralatan juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri dan wisata. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur jalan, Irigasi, SPAM dan Sanitasi perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk.

Sejalan dengan bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilakukan, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan jangka pendek dan jangka menengah sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Mempedomani Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk periode tahun 2025-2029, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk adalah melalui upaya :

1. Pengembangan-pengembangan infrastruktur Jalan dan Jembatan lebih lanjut, dengan prioritas pengembangan yang ditekankan pada wilayah-

wilayah potensial, wilayah yang terisolasi (infrastruktur terbatas), Wilayah kawasan agropolitan dan wisata.

2. Perbaikan jaringan jalan yang mengalami kerusakan dengan dilakukan secara berkesinambungan.
3. Peningkatan pemeliharaan jaringan jalan.
4. Mengusulkan beberapa kegiatan untuk mendapatkan bantuan pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan ke Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Timur.
5. Peningkatan rasio rumah tangga yang mendapat Akses Akses Air Minum aman dan layak.
6. Peningkatan rasio rumah tangga yang mendapat Akses Sanitasi aman dan layak.
7. Peningkatan Sistem Drainase Terpadu.
8. Peningkatan aksesibilitas dan tingkat layanan pada fasilitas umum dan bangunan gedung pemerintah.
9. Peningkatan pemenuhan standar teknis bangunan gedung menuju laik fungsi.
10. Peningkatan rasio IKSI Kewenangan Kabupaten.
11. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang.
12. Peningkatan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi yang kompeten.

Perkuatan kemampuan institusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersihPembangunan Perindustrian dan Perdagangan sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor industri dan perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Kabupaten Nganjuk Untuk itu peran industri dalam perekonomian adalah dengan pengembangan industri kecil termasuk industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas serta pengembangan Industri pengolahan hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sector pertanian haruslah menjadi Prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi.

Capaian kinerja Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk tahun 2019-2023 dan 2024 melaui :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum

4) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
7) Program Penataan Bangunan Gedung
8) Program Penyelenggaraan Jalan
9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

berdasarkan pengukuran yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat, maka pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, meliputi 2 jenis pelayanan dasar yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari
   Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik
   Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai capaian kinerja Renstra DPUPR Tahun 2018-2023 dan 2024 diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap

Jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional merupakan upaya pemerintah daerah dalam pemeliharaan, peningkatan maupun pembangunan jalan sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan.

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalan Kabupaten (Km)	1.153,482	1.153,482	1.153,482	1.153,482	1.153,482
Target	715,159 Km (62,00 %)	738,228 Km (64,00 %)	1.038,134 Km (90 %)	1.061,203 Km (92 %)	1.095,808 Km (95 %)
Realisasi	873,440 Km (75,73 %)	982,923 Km (85,213 %)	1.004,358 Km (87,072 %)	1.016,419 Km (88,117 %)	1.095,808 Km (95 %)
Capaian	122,15 %	133,145 %	96,75 %	95,78 %	100 %

Sumber : LKPJ Dinas PUPR Tahun 2019-2023

Berdasarkan realisasi kinerja selama 2019-2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun demikian dengan adanya penambahan panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana amanat undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, serta mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja indikator persentase jalan dalam kondisi mantab fungsional untuk periode perencanaan selanjutnya.

Pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mengampu indikator **"Persentase kondisi mantap jalan kabupaten"** Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten adalah Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dan Sedang di banding dengan Panjang Total Jalan Kabupaten. Kemantapan jalan adalah kualitas fisik dan pelayanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi persyaratan minimum agar jalan dapat beroperasi secara optimal. Jalan yang dikategorikan mantap adalah jalan yang kondisinya baik dan sedang, sedangkan jalan yang tidak mantap adalah jalan yang kondisinya rusak ringan atau rusak berat. Adapun formulasi perhitungan Persentase

Kondisi Mantap Jalan Kabupaten di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

$$\frac{Panjang\ jalan\ kewenangan\ kabupaten\ \ dalam\ kondisi\ baik\ dan\ sedang\ (km)}{Total\ panjang\ jalan\ kewenangan\ kabupaten\ (km)}\ x\ 100\ \%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka realisasi dan capaian Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Keterangan	2024
Panjang Jalan Kabupaten (Km)	1.481,997
Target	72,39% (1.072,82 Km)
Realisasi	68,214 % (1.010,931 Km)
Capaian	94,23%

Sumber : LKPJ Dinas PUPR Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas meskipun realisasi kinerja Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten Tahun 2024 belum dapat mencapai target namun demikian secara capaian kinerja telah mencapai nilai ≥ 90, sehingga capaian kinerjanya termasuk sangat tinggi.

Pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mengampu indikator **"Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap".** Persentase Jalan dalam kondisi mantap adalah Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dan Sedang di banding dengan Total Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten. Kemantapan jalan adalah kualitas fisik dan pelayanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi persyaratan minimum agar jalan dapat beroperasi secara optimal. Jalan yang dikategorikan mantap adalah jalan yang kondisinya baik dan sedang, sedangkan jalan yang tidak mantap adalah jalan yang kondisinya rusak ringan atau rusak berat.

2. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi

Persentase Panjang Irigasi Daerah yang Mengaliri Persawahan merupakan salah satu indikator yang menyatakan luas jaringan irigasi di Kabupaten Nganjuk dalam kondisi baik pada Renstra Periode 2018-2023 dengan perhitungan realisasi sebagai berikut:

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Jaringan Irigasi (Ha)	14.951	14.951	14.951	14.951	14.951
Target	10.601,75 Ha (70,91 %)	10.691,46 Ha (71,51 %)	10.781,17 Ha (72,11 %)	10.856 Ha (72,61%)	10.931 Ha (73,11 %)
Realisasi	901,246 Ha (60,28 %)	9.087,74 Ha (60,78 %)	11.484,88 Ha (76,817 %)	10.398 Ha (69,55%)	11.261 Ha (75,32 %)
Capaian	85,01 %	84,99 %	106,53 %	95,76%	103,02 %

Sumber : LKPJ Dinas PUPR Tahun 2019-2023

Pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengampu indikator sasaran **"Indeks Kinerja Saluran Irigasi (IKSI) Kewenangan Kabupaten"** yang di mana IKSI merupakan penilaian untuk mengetahui kondisi kinerja irigasi pada Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mendukung produktivitas pertanian. Pengukuran IKSI berdasarkan petunjuk Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, meliputi 6 indikator dengan dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

1. Prasarana Fisik (45%);
2. Produktivitas tanam (15%);
3. Sarana Penunjang (10%);
4. Organisasi personalia (15%);
5. Dokumentasi (5%);
6. Kondisi Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) (10%).

Adapun IKSI Kabupaten Nganjuk didapatkan dari rata rata nilai IKSI 210 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Nganjuk, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status daerah Irigasi, dengan rumus:

$$\sum_{DI=n}^{DI=1} \frac{IKSI\ DI}{n}$$

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk, didapatkan bahwa rata-rata nilai IKSI pada 210 DI Kewenangan Kabupaten (Berdasarkan Permen PUPR Nomor 12/ PRT/M/2015) hingga sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 72,25%. Sehingga capaian IKSI Kewenangan Kabupaten Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2024
Target	77
Realisasi	72,25
Capaian	93,83 %

Sumber : LKPJ Dinas PUPR Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas meskipun realisasi kinerja IKSI Kewenangan Kabupaten belum dapat mencapai target namun demikian secara capaian kinerja telah mencapai nilai ≥ 90, sehingga capaian kinerjanya termasuk sangat tinggi.Berdasarkan realisasi kinerja dari tahun 2019-2023 dan 2024 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berhasil mencapai target tahunan yang ditetapkan.

Pada Tahun 2025, Indikator sasaran ini mengalami perubahan Sasaran " Meningkatnya Kinerja Layanan Daerah Irigasi" dengan indikator sasaran "Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kotayang dilayani oleh jaringan irigasi" dan indikator sasaran "Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota".

Adapun rumus perhitungan indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kotayang dilayani oleh jaringan irigasi.

Base line Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024
Total Luas DI Kewenangan Kabupaten	14.951 Ha
Realisasi Luas Daerah Irigasi yang dilayani Jaringan Irigasi	11.261 Ha
Persentase Luasi Daerah Irigasi yang dilayani Jaringan Irigasi	75,31 %

3. Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengedalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota

Indikator Sasaran "Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengedalian Banjir Di WS

Kewenangan Kab/Kota" merupakan indikator sasaran baru pada periode Resntra Tahun 2025-2029. Indikator ini merupakan pendukung sasaran " Meningkatnya Kinerja Layanan Daerah Irigasi".

baseline tahun 2024 dapat diperoleh sebagai berikut :

Keterangan	Tahun 2024
Total Panjang Sungai yang Ditangani	19.563,20 Ha
Realisasi Panjang Sungai dalam Kondisi Baik Tahun 2024	14.952,15 Ha
Persentase Luasi Daerah Irigasi yang dilayani Jaringan Irigasi Tahun 2024	**76,43 %**

4. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Keciptakaryaan sesuai Standar Teknis

Persentase Pemenuhan Infrastruktur Keciptakaryaan sesuai Standar Teknis pada indikator sasaran Renstra Tahun 2025-2029 merupakan indikator sasaran baru. Dimana sebelumnya indikator ini merupakan indikator gabungan dari keciptakaaryaan.

Perolehan Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Komponen perolehan realisasi program keciptakaryaan	Nilai Maksimal	Bobot tiap komponen	Skor perolehan	Bobot Perolehan	Total
1	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	100	20	99,530	(99,530/100)x20	19,91
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	100	20	70	(70/100)x20	14
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100	20	91,46	(91,46/100)x20	18,29
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100	20	60	(60/100)x20	12
5	Program Penataan Bangunan Gedung	100	20	83,33	(83,33/100)x20	16,66
Jumlah						80,86

5. Persentase penataan ruang sesuai dengan RTRW

Jumlah pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Luas lahan sesuai rencana tata ruang (m^2)	153.058.800	153.058.800	153.058.800	153.058.800
Target	121.880.722 m^2 (79,63 %)	122.646.016 m^2	123.411.310 m^2 (80,63 %)	124.329.663 m^2 (81,23 %)
Realisasi	122.698.278 m^2 (80,16 %)	124.523.018 m^2 (81,36 %)	124.658.263 m^2 (81,44 %)	125.408.794 m^2 (81,94 %)
Capaian	100,67 %	101,53 %	101,004 %	100,87 %

Sumber : LKPJ Dinas PUPR Tahun 2019-2023

Berdasarkan realisasi kinerja selama 2019-2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun demikian dengan adanya penambahan target setiap tahunnya maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja indikator untuk periode perencanaan selanjutnya.

Pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk mengampu sasaran indikator "**Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang**" dan pada tahun 2025 mengalami perubahan indikator sasaran **"Persentase Penataan Ruang sesuai dengan RTRW"** dengan perhitungan Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang merupakan persentase luas pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana Tata Ruang dibanding dengan luas total lahan yang diajukan. Capaian Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2024
Target Luas pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang (m^2)	100% (395.884 m^2)

Realisasi Luas total lahan yang diajukan (m^2)	100% (395.884 m^2)
Capaian	100%

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan realisasi kinerja selama 2024-2026 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun demikian dengan adanya penambahan target setiap tahunnya maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja indikator untuk periode perencanaan 2025-2029.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada tahun					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi		%	70,91	71,51	72,11	72,61	73,11	-	60,28	60,78	76,817	69,55	75,32	-	85,01	84,99	106,53	95,76	103,02	-
	Indikator sasaran Periode 2024-2026 : Indeks Kinerja Saluran Irigasi (IKSI) Kewenangan Kabupaten		Indeks	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	72,25	-	-	-	-	-	93,83
	Indikator Sasaran Periode 2025-2029 : **Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi**		%												75,31						
	Indikator Sasaran Periode 2025-2029 : **Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengedalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota**		%												63,49						

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada tahun					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	100 %		-	-	-	96,9	97,10	-	-	-	-	96,41	99,34	-	-	-	-	99,49	102,31	-
	Indikator sasaran Periode 2024-2026 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi		%	-	-	-	-	-	96,23	-	-	-	-	-	99,53	-	-	-	-	-	103,43
	Indikator sasaran Periode 2024-2026 : Persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum aman		%	-	-	-	-	-	15,8						17,79						112,59
	Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/komunitas/kawasan/kota	100 %	%	-	-	-	64,40	64,60	-	-	-	-	99,98	98,81	-	-	-	-	155,25	152,96	-
	Indikator sasaran Periode 2024-2026 : Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik layak dan aman		%	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	96,95	-	-	-	-	-	102,05

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada tahun					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Pemenuhan drainase lingkungan		%	-	-	-	91,1	92,51	-	-	-	-	87,78	92,51	-	-	-	-	96,36	100	-
	Persentase Bangunan Pelayanan Publik Yang Berfungsi Baik		%	32,25	33,82	90,95	92,02	93,25	-	88,89	89,02	86,46	86,73	93,25	-	275,63	263,22	95,06	94,25	100	-
	Persentase pemenuhan infrastruktur persampahan		%	-	-	-	19,9	20,7	-	-	-	-	16,6	16,6	-	-	-	-	83,41	80,19	-
	Indikator Sasaran Periode 2025-2029 : **Persentase pemenuhan infrastruktur keciptakaryaan sesuai standar teknis**														80,86						
3	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Fungsional		%	62	64	90	92	95	-	75,73	85,213	87,072	88,117	95	-	122,15	133,145	96,75	95,78	100	-
	Indikator sasaran Periode 2024-2026 : Persentase kondisi mantap jalan kabupaten		%	-	-	-	-	-	72,39	-	-	-	-	-	68,214	-	-	-	-	-	94,23

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada tahun					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Jembatan Di Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		%	73,01	74,47	90,38	92,35	94,98	-	85,33	88,35	89,10	89,71	94,98	-	116,77	118,64	98,584	97,14	100	-
	IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) Peralatan		Nilai	B	B	B	B	B	-	B	B	B	B	B	-	B	B	B	B	B	-
	Indikator sasaran periode 2025-2029 : **Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap**		%												68,214						
4	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang		%	79,63	80,13	80,63	81,23	81,83	100	80,16	81,36	81,44	81,94	82,10	100	100,67	101,53	101,004	100,87	100,33	100
	Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Tersusun		%	30	20	15	-	-	-	30	30	30	-	-	-	100	150	200	-	-	-

Sumber: *Laporan Evaluasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2023 dan Laporan Evaluasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026*

Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	SEBELUM PERUBAHAN																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.635.335.301,00	1.545.175.400,00	-	-	-	-	1.459.407.220,00	1.384.044.676,00	-	-	-	-	89,24	89,57	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.381.852.000,00	1.456.596.000,00	-	-	-	-	1.989.843.440,00	1.387.276.278,00	-	-	-	-	83,54	95,24	-	-	-	-
3	Program peningkatan disiplin aparatur	6.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	5.500.000,00	7.700.000,00	-	-	-	-	91,67	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	49.262.000,00	54.712.000,00	-	-	-	-	16.625.400,00	50.343.400,00	-	-	-	-	33,75	-	-	-	-	-
5	Program pembangunan jalan dan jembatan	121.907.316.000,00	-	-	-	-	-	110.199.894.160,00	-	-	-	-	-	90,4	-	-	-	-	-
6	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.300.000.000,00	-	-	-	-	-	1.286.634.000,00	-	-	-	-	-	98,97	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Program pembangunan turap/talud/bronjong	13.050.000.000,00	-	-	-	-	-	12.649.130.000,00	-	-	-	-	-	96,93	-	-	-	-	-
8	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	90.380.262.000,00	-	-	-	-	-	86.036.570.100,00	-	-	-	-	-	95,19	-	-	-	-	-
9	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	1.117.726.400,00	-	-	-	-	-	939.003.240,00	-	-	-	-	-	84,01	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	725.390.000,00	-	-	-	-	-	623.098.100,00	-	-	-	-	-	85,9	-	-	-	-	-
11	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	14.577.608.000,00	-	-	-	-	-	13.672.950.808,00	-	-	-	-	-	93,79	-	-	-	-	-
12	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, Bendungan dan Sumber Daya Air Lainnya	9.255.000.000,00	-	-	-	-	-	8.576.940.509,65	-	-	-	-	-	92,67	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Program Pengendalian Banjir	9.342.000.000,00	-	-	-	-	-	8.512.727.120,00	-	-	-	-	-	91,12	-	-	-	-	-
14	Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum	5.100.000.000,00	-	-	-	-	-	4.896.897.500,00	-	-	-	-	-	96,02	-	-	-	-	-
15	Program Rehabilitasi, Revitalisasi dan Refungsionalisasi Bangunan dan Gedung Pemerintah.	39.882.955.000,00	-	-	-	-	-	37.596.573.600,00	-	-	-	-	-	94,27	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16	Program Perencanaan Tata Ruang	1.850.000.000,00	-	-	-	-	-	1.484.554.050,00	-	-	-	-	-	80,25	-	-	-	-	-
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	125.000.000,00	350.000.000,00	-	-	-	-	91.209.500,00	243.708.650,00	-	-	-	-	72,97	69,63	-	-	-	-
18	Program pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya	-	123.763.724.000,00	-	-	-	-	-	119.633.220.635,00	-	-	-	-	-	96,66	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19	Program peningkatan sarana, prasarana dan pembinaan jasa konstruksi	-	1.025.405.000,00	-	-	-	-	-	890.020.500,00	-	-	-	-	-	86,8	-	-	-	-
20	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	-	11.189.000.000,00	-	-	-	-	-	10.708.784.845,11	-	-	-	-	-	95,71	-	-	-	-
21	Program Tata Bangunan	-	7.395.855.200,00	-	-	-	-	-	7.022.634.751,65	-	-	-	-	-	94,95	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	Program Pendataan, Perencanaan, Pengendalian Teknis dan Pengadaan Tanah	-	4.220.000.000,00	-	-	-	-	-	3.225.669.700,00	-	-	-	-	-	76,44	-	-	-	-
	SESUDAH PERUBAHAN																		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	29.445.056.500,00	31.768.113.276,00	31.349.232.000,00	30.607.655.236,00	-	-	26.490.444.465,00	28.121.063.541,00	28.091.851.426,00	27.328.236.646,00	-	-	89,97	88,52	89,61	89,29
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	-	-	24.183.847.000,00	16.966.348.919,00	23.185.000.000,00	27.200.000.000,00	-	-	21.517.988.466,00	15.248.000.361,00	22.082.155.880,00	26.043.975.141,00	-	-	88,98	89,87	95,24	95,75

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	-	-	6.600.000.000,00	19.382.000.000,00	24.690.000.000,00	16.865.000.000,00	-	-	6.398.919.906,00	19.277.140.000,00	24.182.771.660,00	16.069.032.600,00	-	-	96,95	99,46	97,95	95,28
4	Program Penataan Bangunan Gedung	-	-	9.100.000.000,00	35.000.000.000,00	36.190.100.000,00	17.929.273.814,00	-	-	8.342.146.889,02	34.431.776.345,20	35.378.433.270,00	17.162.769.818,00	-	-	91,67	98,38	97,76	95,72
5	Program Penyelenggaraan Jalan	-	-	133.493.241.101,00	148.365.162.961,00	151.006.774.539,00	170.693.779.837,00	-	-	120.906.316.506,40	140.003.496.680,00	145.719.644.260,00	166.526.118.614,50	-	-	90,57	94,36	96,50	97,56

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	-	-	100.000.000,00	170.000.000,00	167.000.000,00	320.000.000,00	-	-	63.956.900,00	132.447.950,00	154.614.400,00	316.207.700,00	-	-	63,96	77,91	92,58	98,81
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	1.500.000.000,00	1.185.328.750,00	1.531.375.650,00	1.389.000.000,00	-	-	1.161.516.150,00	1.003.586.190,00	1.391.634.975,00	1.238.761.035,00	-	-	77,43	84,67	90,87	89,18
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	-	6.907.950.000,00	9.057.647.000,00	8.325.078.760,00	-	-	-	5.580.122.592,00	8.927.679.330,00	7.756.086.990,00	-	-	-	80,78	98,57	93,17

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	-	-	5.055.000.000,00	9.825.500.000,00	11.166.000.000,00	-	-	-	5.025.612.300,00	9.819.351.620,00	11.149.659.500,00	-	-	-	99,42	99,94	99,85
10	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	-	-	60.000.000,00	845.000.000,00	-	-	-	-	58.608.333,00	804.288.500,00	-	-	-	-	97,68	95,18
11	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	-	-	-	4.591.448.292,00	100.000.000,00	-	-	-	-	4.484.343.000,00	91.957.146,00	-	-	-	-	97,67	91,96	-

Sumber: LRA Perangkat Daerah*) Tahun 2019-2022

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	Target SPM	IKK	Target Renstra PD 2018-2023 (%)						Realisasi (%)						Proyeksi
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	-	-	-	96,9	97,10	-	-	-	-	96,41	99,34	-	-
			IKK Tahun 2024-2026 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	-	-	-	-	-	96,23	-	-	-	-	-	99,53	98,43
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/komunitas/kawasan/kota	-	-	-	64,4	64,6	-	-	-	-	99,98	98,81	-	-
			IKK Tahun 2024-2026 : Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik layak dan aman	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	96,95	95,5

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan analisis tabel 2.1 dan 2.2 rata-rata capaian kinerja maupun capaian realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai lebih dari 76% atau dapat dikategorikan memiliki predikat "tinggi". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diampu dengan **"Tinggi"**.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan daerah :"meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan kokoh melalui pemerataan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan hidup, serta penanganan kemiskinan daerah", masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Nganjuk merupakan kelompok sasaran layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini sesuai dengan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, meliputi:

1. Penyelenggaraan Jalan
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik
4. Pengelolaan Sumber Daya Air (jaringan irigasi)
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Pengelolaan Sampah, dan
7. Penataan gedung bangunan daerah untuk menunjang pelayanan publik
8. Pengembangan Jasa Konstruksi

Disamping Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, dalam rangka meningkatkan ketaatan ruang daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga memberikan layanan penerbitan rekom teknis tataruang KKPR (kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang) yang menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan persetujuan bangunan gedung (PBG/pengganti IMB)

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan dan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki mitra perangkat daerah yaitu KODIM 0810 Nganjuk pada pembangunan infrastruktur (khususnya jalan) dalam rangka pelaksanaan kegiatan TMMD/Bakti TNI. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga memiliki mitra perangkat daerah lain seperti Lembaga Non-Pemerintah (Swasta & BUMN) seperti Kontraktor Konstruksi (Penyedia Jasa), Konsultan Perencana dan Pengawas, Lembaga Akademik dan Peneliti seperti

Universitas (Perguruan Tinggi Negeri/Swasta), Kelompok Masyarakat (Pokmas) : GHIPPA/GP3A,KPP dan KPSPAM.

f. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya meningkatkan akses rumah tangga dalam mendapatkan layanan air minum aman (perpipaan) dan pencapaian target SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang Air minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membutuhkan dukungan dari PDAM Nganjuk selaku BUMD Kabupaten Nganjuk sebagai penyelenggara (Pengelolaan dan Pengembangan) Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan (SPAM) di wilayah perkotaan kabupaten Nganjuk. Adapun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memfasilitasi penyelenggaraan (Pengelolaan dan Pengembangan) SPAM wilayah perdesaan, baik melalui pendanaan APBD, DAK maupun APBN (program SPAM berbasis Masyarakat).

g. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang dituangkan dalam bentuk Kesepakan Bersama dengan No. : 03/PKS/Am/2022 No. 415.4/05/411.010/2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Brantas di Kabupaten Nganjuk. Dalam Kesepakan Bersama dijelaskan tentang ruang lingkup kesepakatan bersama antara lain:

a. Konservasi Sumber Daya Air;
b. Pendayagunaan Sumber Daya Air;
c. Pengendalian Daya Rusak Air;
d. Sistem Informasi Sumber Daya Air;
e. Pemberdayaan Masyarakat;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Identifikasi Permasalahan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya, permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target dan tujuannya dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan, dan penataan ruang yang dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

A. Kebinamargaan

1) Tingkat kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan. Panjang jalan di Kabupaten Nganjuk adalah 1.481,997 km dan sepanjang 1.010,931 Km (68,214 %) dalam kondisi baik pada tahun 2024.
2) Kelebihan tonase angkutan barang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
3) Masih belum memadainya akses Jalan Nganjuk-Ngangkatan-Gondang-lengkong-Jatikalen untuk rencana pengembangan Kawasan Industri Nganjuk.
4) Masih belum terealisirnya pengembangan Jalan Lingkar Wilis (Perbatasan Nganjuk - Madiun – Bendolo – Proliman – Sidorejo – Bulak Kepel – Ngetos – Blongko – Bajulan – Perbatasan Nganjuk Kediri.
5) Rendahnya akses jalan dan jembatan serta penyediaan infrastruktur penunjang pada wilayah perbatasan
6) Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah
7) Upaya hemat energi dan infrastruktur hijau (green infrastructure). Keterpaduan infrastruktur dengan mengatasi degradasi lingkungan pada kawasan tertentu.
8) Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar kawasan. Pertumbuhan ekonomi masih terpusat pada titik-titik tertentu saja, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antar kawasan
9) Masih adanya kawasan tertinggal, yaitu masyarakatnya memiliki keterbatasan akses kepada pelayanan sosial, ekonomi dan politik serta terisolir dari wilayah sekitarnya
10) Belum adanya penetapan SK jalan kewenangan kabupaten yang terbaru terkait Amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada pasal 9 ayat 8 telah menambahkan Jalan

antardesa yaitu Jalan yang menghubungkan antara 2 (dua) desa dan Jalan poros desa yaitu Jalan yang melintasi dan/atau menghubungkan lebih dari 2 (dua) desa ke dalam jalan Kabupaten

B. CIPTA KARYA

1) Masih Perlunya peningkatan mutu bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum lainnya.
2) Perlu adanya peningkatan aksesibilitas dan tingkat layanan pada fasilitas umum dan bangunan gedung pemerintah
3) Perlunya peningkatan pemenuhan standar teknis bangunan gedung menuju laik fungsi
4) Perlunya penyediaan sarana bangunan gedung antara lain gedung perkantoran, pusat kegiatan kreatif dan lain sebagainya sebagai penunjang pelaksanaan fungsi urusan pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
5) Belum ada rencana lanjut drainase yang terpadu
6) Perlu adanya lembaga pengelola sarana dan prasarana drainase
7) Perlu adanya pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan, efektif, efesiensi dan berkelanjutan.
8) Berkurangnya daerah resapan air disebabkan oleh perkembangan penduduk yang terlalu cepat.
9) Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan saluran.
10) Perkembangan pembangunan Perkotaan dilakukan secara bertahap
11) Tingkat layanan akses air minum perpipaan masih rendah
12) Kurangnya pembinaan kepada Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KP-SPAM)
13) Belum adanya IPLT
14) Belum adanya rantai layanan dalam pengelolaan lumpur tinja
15) Kurangnya peran serta Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sanitasi di tingkat desa
16) Penyediaan infrastruktur Persampahan yang perlu ditingkatkan secara bertahap.

C. Pengairan

1) Perlunya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi. mengingat Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional.
2) Perlunya peningkatan luas daerah irigasi yang terlayani dalam kondisi baik Kewenangan Kabupaten.
3) Perlunya peningkatan fungsi tampungan air untuk konservasi dan penyediaan air baku irigasi
4) Ketersediaan volume air waduk/embung di wilayah utara Nganjuk sangat mengkhawatirkan pada musim kemarau disebabkan sedimentasi dan sumber mata air yang kurang, sehingga terjadi kekurangan air irigasi antara lain kecamatan Jatikalen, Kec. Ngluyu, Kec. Gondang dan Kec. Rejoso.
5) Masih sering terjadi air genangan pada musim hujan antara lain daerah Kec. Pace, Kec. Berbek, Kec. Gondang dan Kec. Jatikalen.
6) Kawasan Industri Nganjuk belum didukung oleh ketersediaan air baku.
7) Belum adanya batas sepadan sungai
8) Masih adanya bangunan di atas batas sempadan sungai, antara lain sungai kuncir kanan dan kuncir kiri (Kel. Ploso, Kel. Mangundikaran, dll),
9) Masih minimnya upaya pemeliharaan bendungan, waduk dan embung sebagai sumberdaya air
10) Peningkatan pengelolaan sumber daya air baik untuk kepentingan konservasi, penyediaan air irigasi dan pengendalian banjir melalui pembangunan dam, embung, waduk, saluran irigasi, normalisasi sungai dan bangunan pengendali sedimen
11) Masih terjadi disetiap tahun peristiwa kekurangan air baku untuk air minum dan air irigasi pada musim kemarau dan sebaliknya kejadian banjir/genangan pada musim hujan

D. Penataan Ruang

1) Belum dikembangkannya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, hal ini disebabkan oleh belum berkembangnya sinergitas serta kerjasama antar pelaku-pelaku pengembangan kawasan (pemerintah, swasta, masyarakat)
2) Belum optimalnya penerapan regulasi maupun dokumen perencanaan tata ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

3) Perkembangan kawasan perkotaan yang tidak seimbang, dan belum sesuai dengan pemanfaatannya.
4) Belum terkoneksinya penataan ruang dengan pembangunan sectoral. Menurunnya daya dukung kawasan strategis cepat tumbuh (kawasan pusat wilayah)

E. BINA JASA KONSTRUKSI
1) Perlu meningkatnya sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi yang kompeten
2) Perlu adanya peningkatan layanan peralatan berat pendukung pembangunan infrastruktur

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
I	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
1		Kurang optimalnya kinerja infrastruktur jalan dan jembatan	Tingkat kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan. Panjang jalan di Kabupaten Nganjuk adalah 1.481,997 km dan sepanjang 1.010,931 Km (68,214 %) dalam kondisi baik pada tahun 2024
			Kelebihan tonase angkutan barang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan
			Masih belum memadainya akses Jalan Nganjuk-Ngangkatan-Gondang-lengkong-Jatikalen untuk rencana pengembangan Kawasan Industri Nganjuk
			Masih belum terealisirnya pengembangan Jalan Lingkar Wilis (Perbatasan Nganjuk - Madiun – Bendolo – Proliman – Sidorejo – Bulak Kepel – Ngetos – Blongko – Bajulan – Perbatasan Nganjuk Kediri
2		Kurangnya pemerataan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	Rendahnya akses jalan dan jembatan serta penyediaan infrastruktur penunjang pada wilayah perbatasan
			Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah
			Upaya hemat energi dan infrastruktur hijau (green infrastructure). Keterpaduan infrastruktur dengan mengatasi degradasi lingkungan pada kawasan tertentu
			Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar kawasan. Pertumbuhan ekonomi masih terpusat pada titik-titik tertentu saja, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antar kawasan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Masih adanya kawasan tertinggal, yaitu masyarakatnya memiliki keterbatasan akses kepada pelayanan sosial, ekonomi dan politik serta terisolir dari wilayah sekitarnya
			Belum masuknya beberapa ruas jalan antardesa dan Jalan poros desa ke dalam SK jalan kewenangan kabupaten
3		Belum optimalnya kinerja bangunan gedung negara dalam menunjang pelayanan publik	Masih Perlunya peningkatan mutu bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum lainnya
			Perlu adanya peningkatan aksesibilitas dan tingkat layanan pada fasilitas umum dan bangunan gedung pemerintah
			Perlunya peningkatan pemenuhan standar teknis bangunan gedung menuju laik fungsi
			Perlunya penyediaan sarana bangunan gedung antara lain gedung perkantoran, pusat kegiatan kreatif dan lain sebagainya sebagai penunjang pelaksanaan fungsi urusan pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah
4		Belum optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Belum ada rencana lanjut drainase yang terpadu
			Perlu adanya lembaga pengelola sarana dan prasarana drainase
			Perlu adanya pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan, efektif, efesiensi dan berkelanjutan
			Berkurangnya daerah resapan air disebabkan oleh perkembangan penduduk yang terlalu cepat
			Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan saluran

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
5		Belum optimalnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Yang di kelola dan dikembangkan	Tingkat layanan akses air minum perpipaan masih rendah
			Kurangnya pembinaan kepada Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KP-SPAM)
6		Belum optimalnya Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten	Belum adanya IPLT
			Belum adanya rantai layanan dalam pengelolaan lumpur tinja
			Kurangnya peran serta Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sanitasi di tingkat desa
7		Belum optimalnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten	Penyediaan infrastruktur Persampahan yang perlu ditingkatkan secara bertahap
8		Kurangnya ketersediaan air irigasi dibandingkan dengan kebutuhan	Perlunya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi. mengingat Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional.
			Perlunya peningkatan Luas daerah irigasi yang terlayani dalam kondisi baik kewenangan Kabupaten
			Perlunya peningkatan fungsi tampungan air untuk konservasi dan penyediaan air baku irigasi
			Ketersediaan volume air waduk/embung di wilayah utara Nganjuk sangat mengkhawatirkan pada musim kemarau disebabkan sedimentasi dan sumber mata air yang kurang, sehingga terjadi kekurangan air irigasi antara lain kecamatan Jatikalen, Kec. Ngluyu, Kec. Gondang dan Kec. Rejoso

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Masih sering terjadi air genangan pada musim hujan antara lain daerah Kec. Pace, Kec. Berbek, Kec. Gondang dan Kec. Jatikalen
			Kawasan Industri Nganjuk belum didukung oleh ketersediaan air baku
			Belum adanya batas sepadan sungai
			Masih adanya bangunan di atas batas sempadan sungai, antara lain sungai kuncir kanan dan kuncir kiri (Kel. Ploso, Kel. Mangundikaran, dll),
			Masih minimnya upaya pemeliharaan bendungan, waduk dan embung sebagai sumberdaya air
			Peningkatan pengelolaan sumber daya air baik untuk kepentingan konservasi, penyediaan air irigasi dan pengendalian banjir melalui pembangunan dam, embung, waduk, saluran irigasi, normalisasi sungai dan bangunan pengendali sedimen
			Masih terjadi disetiap tahun peristiwa kekurangan air baku untuk air minum dan air irigasi pada musim kemarau dan sebaliknya kejadian banjir/genangan pada musim hujan
9		Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan ruang	Belum dikembangkannya Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh, hal ini disebabkan oleh belum berkembangnya sinergitas serta kerjasama antar pelaku-pelaku pengembangan kawasan (pemerintah, swasta, masyarakat)

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Belum optimalnya penerapan regulasi perencanaan tata ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang
			Perkembangan kawasan perkotaan yang tidak seimbang, dan belum sesuai dengan pemanfaatannya
			Belum terkoneksinya penataan ruang dengan pembangunan sectoral. Menurunnya daya dukung kawasan strategis cepat tumbuh (kawasan pusat wilayah)

b. Perumusan Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:

1. Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Bab II Dokumen Renstra ini beserta permasalahan yang dihadapi
2. Sasaran jangka menengar Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi:
   (1) Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air.
   (2) Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional
   (3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan
   (4) Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan
   (5) Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi
   (6) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
3. Dukungan dalam mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041.

Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka isu strategis dalam pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk adalah Peningkatan kualitas infrastruktur pekerjaan umum melalui:

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memenuhi standar

2. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Selingkar Wilis sebagai Kawasan Agropolitan dan Wisata
3. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Peruntukan Industri dan atau Kawasan Industri serta lokasi rencana eksplorasi sumber daya energi di Kabupaten Nganjuk
4. Pembangunan jalan poros desa terpencil/ terisolir/ perbatasan
5. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan
6. Pelaksanaan pembangunan sambungan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan terlindungi
7. Merencanakan dan mengadakan sosialisasi akan pentingnya biopori dan sumur resapan
8. Perbaikan/pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten
9. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi yang aman dan layak
10. Meningkatkan penyediaan infrastruktur persampahan
11. Meningkatkan sistem drainase terpadu dan terhubung dengan sungai
12. Penggunaan teknologi hijau dan biopori
13. Pemeliharaan fasilitas umum dan bangunan gedung pemerintah yang inklusif
14. Pembangunan bangunan gedung Negara antara lain gedung perkantoran, pusat kegiatan kreatif dan lain sebagainya sebagai penunjang pelaksanaan fungsi urusan pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
15. Optimalisasi kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung
16. Melaksanakan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dan prasarana sumber daya air yang memadai guna mendukung swasembada pangan
17. Mengoptimalkan fungsi tampungan air untuk konservasi dan penyediaan air baku irigasi
18. Meningkatkan peran kelembagaan pengelola irigasi, baik dari pemerintah, komisi irigasi, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
19. Manajemen pengelolaan sumber daya air melalui konservasi sumber mata air dan rehabilitasi waduk untuk penyediaan air irigasi beserta jaringannya dan pengendalian banjir.

20. Peningkatan pengelolaan sumber daya air baik untuk kepentingan konservasi, penyediaan air irigasi dan pengendalian banjir melalui pembangunan dam, embung, waduk, saluran irigasi, normalisasi sungai dan bangunan pengendali sedimen
21. Penertiban sempadan jalan, sempadan saluran dan sempadan sungai.
22. Pemerataan pembangunan infrastruktur antar kawasan pertumbuhan.
23. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan ke kawasan-kawasan potensial dan strategis.
24. Pengembangan jalan tembus kabupaten/kota disekitar Kabupaten Nganjuk.
25. Pembangunan jalan lingkar Kota Nganjuk untuk mengatasi konsentrasi jalan arteri primer yang melewati perkotaan Nganjuk dan untuk mendorong pemerataan perkembangan perkotaan dan memperlancar arus regional dengan mengacu pada perencanaan.
26. Peningkatan pelaksanaan Standar Pedoman Manual pengujian mutu material dan konstruksi untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.
27. Peningkatan Dimensi saluran drainase yang tidak sesuai dengan kapasitas daya tampung
28. Pengelolaan Persampahan.
29. Peningkatan Akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman masih Kurang, terutama di daerah pedesaan.
30. Optimalisasi penerapan regulasi maupun dokumen perencanaan tata ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
31. Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
32. Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk mendukung investasi
33. Peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan KKPR dan PBG
34. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi
35. Meningkatkan layanan laboratorium yang terstandarisasi KAN
36. Meningkatkan layanan peralatan berat pendukung pembangunan infrastruktur
37. Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Ketiga

Berdasarkan berbagai permasalahan yang faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelayan serta isu-isu strategis yang

berkenaan dengan tugas dan fungsi, maka yang menjadi Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kesiapan sumberdaya manusia Dinas PU dan Penataan Ruang.
2. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor.
3. Daya dukung sarana dan prasarana pelayanan kebinamargaan.
4. Adanya kebijakan pemerintah dalam membantu pendanaan di bidang pembangunan jalan dan jembatan melalui dana APBN.
5. Adanya partisipasi masyarakat dalam membangun dan memelihara jalan.
6. Adanya komitmen unsur pimpinan SKPD untuk membangun organisasi yang maju.
7. Kuantitas dan kualitas penyedia jasa konstruksi yang memadai.

Tabel 2.6

Penyimpulan Isu Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalah Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Terwujudnya Kualitas Infrastruktur pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Masih belum optimalnya peningkatan iklim investasi membutuhkan upaya memperkuat infrastruktur ekonomi, mempermudah regulasi investasi, dan mendorong sektor-sektor unggulan di wilayah tertinggal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; 2. Disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah yang memerlukan pemerataan	***Green* Development** *Green development* (pembangunan hijau) adalah proses pembangunan yang dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, seimbang dan berkelimpahan, serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Tujuan dari pembangunan hijau adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mencapai kemajuan yang	**Pembangunan Infrastruktur** Pembangunan infrastruktur yang kokoh menjadi elemen krusial bagi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, meningkatkan produktivitas nasional, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh daerah, termasuk kawasan	Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi Dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan	1. Kurang optimalnya kinerja infrastruktur jalan dan jembatan 2. Kurangnya pemerataan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 3. Belum optimalnya kinerja bangunan gedung negara dalam menunjang pelayanan publik 4. Belum optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai 5. Belum optimalnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Yang di kelola dan dikembangkan 6. Belum optimalnya Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten 7. Belum optimalnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten 8. Kurangnya ketersediaan air irigasi dibandingkan dengan kebutuhan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalah Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
		infrastruktur, peningkatan kapasitas ekonomi lokal, dan pengembangan potensi daerah sesuai denga karakteristik wilayah; 3. Masih terdapat kesenjangan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan memerlukan kualitas fasilitas, ketersediaan tenaga profesional, dan infrastruktur pendukung di wilayah perdesaan dan tertinggal;	berkelanjutan dalam jangka panjang.	tertinggal dan perbatasan		9. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan ruang

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi Bupati Kabuaten Nganjuk Periode 2025-2029 "**Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat**" dan mengambil Misi Ke-3 **"(M.3) Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan**" dengan program unggulan "(PU. 1) Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Saluran" dan pendukung dari Misi Ke-4 **"(M.4) Meningkatkan Kualitas, Pelayanan, Mutu Pendidikan dan Kesehatan untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas"** dengan program unggulan "(PU.3) Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah **"Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas"** dengan indikator tujuan yaitu **Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**.

Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan .Dengan indikator:
   a. Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap
2. Meningkatnya Kinerja Layanan Daerah Irigasi. Dengan indikator:
   a. Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
   b. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

3. Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Keciptakaryaan. Dengan indikator:
    a. Persentase pemenuhan infrastruktur keciptakaryaan sesuai standar teknis
4. Meningkatnya kualitas penataan ruang. Dengan indikator:
    a. Persentase penataan ruang sesuai dengan RTRW

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
- Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal	Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Yang Berkualitas		Indeks pekerjaan umum dan tata ruang (Indeks)	75,08	75,69	76,4	77,02	77,66	78,3	78,93	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan dalam kondisi mantap (%)	68,214	70,05	72,35	74,31	76,28	78,25	80,22	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Daerah Irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	75,31	75,36	75,41	75,46	75,51	75,56	75,61	
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	76,43	76,93	77,43	77,93	78,43	78,93	79,43	
		Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Keciptakaryaan	Persentase pemenuhan infrastruktur keciptakaryaan sesuai standar teknis (%)	80,42	80,44	80,46	80,47	80,49	80,51	80,53	
		Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase penataan ruang sesuai dengan RTRW (%)	100	100	100	100	100	100	100	

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi adalah sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Adapun Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Visi RPJMD: Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat		
Misi RPJMD: "(M.3) Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas Indikator Tujuan : Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memenuhi standar 2. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Selingkar Wilis sebagai Kawasan Agropolitan dan Wisata 3. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Peruntukan Industri dan atau Kawasan Industri serta

Visi RPJMD:		
Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat		
Misi RPJMD:		
"(M.3) Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
		lokasi rencana eksplorasi sumber daya energi di Kabupaten Nganjuk 4. Meningkatkan Pembangunan jalan poros desa terpencil/ terisolir/ perbatasan 5. Meningkatkan Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi 7. Meningkatkan layanan laboratorium yang terstandarisasi KAN 8. Meningkatkan layanan peralatan berat pendukung pembangunan infrastruktur 9. Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Ketiga

Visi RPJMD: Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat		
Misi RPJMD: "(M.3) Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
	Meningkatnya Kinerja Layanan Daerah Irigasi	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dan prasarana sumber daya air yang memadai guna mendukung swasembada pangan 2. Mengoptimalkan fungsi tampungan air untuk konservasi dan penyediaan air baku irigasi 3. Meningkatkan peran kelembagaan pengelola irigasi, baik dari pemerintah, komisi irigasi, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Keciptakaryaan	1. Meningkatkan pembangunan sambungan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan terlindungi 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sanitasi yang aman dan layak 3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur persampahan 4. Meningkatkan sistem drainase terpadu dan terhubung dengan sungai 5. Meningkatkan Penggunaan teknologi hijau dan biopori

Visi RPJMD: Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat		
Misi RPJMD: "(M.3) Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
		6. Meningkatkan Pemeliharaan fasilitas umum dan bangunan gedung pemerintah yang inklusif 7. Mengoptimalkan kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	1. Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk mendukung investasi Peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan KKPR dan PBG

Tabel 3.3

Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (Tahap 2030)
1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memenuhi standar 2. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Selingkar Wilis sebagai Kawasan Agropolitan dan Wisata 3. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Peruntukan Industri dan atau Kawasan Industri serta lokasi rencana eksplorasi sumber daya energi di Kabupaten Nganjuk	10. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memenuhi standar 11. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Selingkar Wilis sebagai Kawasan Agropolitan dan Wisata 12. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Peruntukan Industri dan atau Kawasan Industri serta lokasi rencana eksplorasi sumber daya energi di Kabupaten Nganjuk 13. Pembangunan jalan poros desa terpencil/ terisolir/ perbatasan 14. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan	1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memenuhi standar 2. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Selingkar Wilis sebagai Kawasan Agropolitan dan Wisata 3. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Peruntukan Industri dan atau Kawasan Industri serta lokasi rencana eksplorasi sumber daya energi di Kabupaten Nganjuk	1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memenuhi standar 2. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Selingkar Wilis sebagai Kawasan Agropolitan dan Wisata 3. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Peruntukan Industri dan atau Kawasan Industri serta lokasi rencana eksplorasi sumber daya energi di Kabupaten Nganjuk	1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memenuhi standar 2. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Selingkar Wilis sebagai Kawasan Agropolitan dan Wisata 3. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Peruntukan Industri dan atau Kawasan Industri serta lokasi rencana eksplorasi sumber daya energi di Kabupaten Nganjuk

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (Tahap 2030)
4. Pembangunan jalan poros desa terpencil/ terisolir/ perbatasan 5. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan		4. Pembangunan jalan poros desa terpencil/ terisolir/ perbatasan 5. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan	4. Pembangunan jalan poros desa terpencil/ terisolir/ perbatasan 5. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan	4. Pembangunan jalan poros desa terpencil/ terisolir/ perbatasan 5. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan
Pelaksanaan pembangunan sambungan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan terlindungi	Pelaksanaan pembangunan sambungan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan terlindungi	Pelaksanaan pembangunan sambungan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan terlindungi	Pelaksanaan pembangunan sambungan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan terlindungi	Pelaksanaan pembangunan sambungan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan terlindungi
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi yang aman dan layak	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi yang aman dan layak	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi yang aman dan layak	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi yang aman dan layak	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi yang aman dan layak
Meningkatkan penyediaan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur persampahan	Meningkatkan penyediaan	Meningkatkan penyediaan	Meningkatkan penyediaan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (Tahap 2030)
infrastruktur persampahan		infrastruktur persampahan	infrastruktur persampahan	infrastruktur persampahan
1. Meningkatkan sistem drainase terpadu dan terhubung dengan sungai 2. Penggunaan teknologi hijau dan biopori	1. Meningkatkan sistem drainase terpadu dan terhubung dengan sungai 2. Penggunaan teknologi hijau dan biopori	1. Meningkatkan sistem drainase terpadu dan terhubung dengan sungai 2. Penggunaan teknologi hijau dan biopori	1. Meningkatkan sistem drainase terpadu dan terhubung dengan sungai 2. Penggunaan teknologi hijau dan biopori	1. Meningkatkan sistem drainase terpadu dan terhubung dengan sungai 2. Penggunaan teknologi hijau dan biopori
Pemeliharaan fasilitas umum dan bangunan gedung pemerintah yang inklusif	Pemeliharaan fasilitas umum dan bangunan gedung pemerintah yang inklusif	1. Penyediaan sarana bangunan gedung sebagai penunjang pelaksanaan fungsi urusan pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah antara lain gedung perkantoran, pusat kegiatan kreatif dan lain sebagainya 2. Pemeliharaan fasilitas umum dan bangunan gedung	1. Perlunya penyediaan sarana bangunan gedung sebagai penunjang pelaksanaan fungsi urusan pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah antara lain gedung perkantoran, pusat kegiatan kreatif dan lain sebagainya 2. Pemeliharaan fasilitas umum dan	1. Perlunya penyediaan sarana bangunan gedung sebagai penunjang pelaksanaan fungsi urusan pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah antara lain gedung perkantoran, pusat kegiatan kreatif dan lain sebagainya 2. Pemeliharaan fasilitas umum dan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (Tahap 2030)
		pemerintah yang inklusif	bangunan gedung pemerintah yang inklusif	bangunan gedung pemerintah yang inklusif
Optimalisasi kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung	Optimalisasi kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung	Optimalisasi kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung	Optimalisasi kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung	Optimalisasi kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung
1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dan prasarana sumber daya air yang memadai guna mendukung swasembada pangan 2. Mengoptimalkan fungsi tampungan air untuk konservasi dan penyediaan air baku irigasi 3. Meningkatkan peran kelembagaan pengelola irigasi,	1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dan prasarana sumber daya air yang memadai guna mendukung swasembada pangan 2. Mengoptimalkan fungsi tampungan air untuk konservasi dan penyediaan air baku irigasi 3. Meningkatkan peran kelembagaan pengelola irigasi, baik dari pemerintah, komisi irigasi, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dan prasarana sumber daya air yang memadai guna mendukung swasembada pangan 2. Mengoptimalkan fungsi tampungan air untuk konservasi dan penyediaan air baku irigasi 3. Meningkatkan peran kelembagaan pengelola irigasi,	1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dan prasarana sumber daya air yang memadai guna mendukung swasembada pangan 2. Mengoptimalkan fungsi tampungan air untuk konservasi dan penyediaan air baku irigasi 3. Meningkatkan peran kelembagaan pengelola irigasi, baik dari	1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dan prasarana sumber daya air yang memadai guna mendukung swasembada pangan 2. Mengoptimalkan fungsi tampungan air untuk konservasi dan penyediaan air baku irigasi 3. Meningkatkan peran kelembagaan pengelola irigasi,

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (Tahap 2030)
baik dari pemerintah, komisi irigasi, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)		baik dari pemerintah, komisi irigasi, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	pemerintah, komisi irigasi, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	baik dari pemerintah, komisi irigasi, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
1. Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk mendukung investasi 3. Peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan KKPR dan PBG	3. Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 4. Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk mendukung investasi 5. Peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan KKPR dan PBG	1. Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk mendukung investasi 3. Peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan KKPR dan PBG	1. Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk mendukung investasi 3. Peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan KKPR dan PBG	1. Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk mendukung investasi 3. Peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan KKPR dan PBG
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi 2. Meningkatkan layanan laboratorium yang terstandarisasi KAN	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (Tahap 2030)
2. Meningkatkan layanan laboratorium yang terstandarisasi KAN 3. Meningkatkan layanan peralatan berat pendukung pembangunan infrastruktur 4. Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Ketiga	3. Meningkatkan layanan peralatan berat pendukung pembangunan infrastruktur 4. Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Ketiga	2. Meningkatkan layanan laboratorium yang terstandarisasi KAN 3. Meningkatkan layanan peralatan berat pendukung pembangunan infrastruktur 4. Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Ketiga	2. Meningkatkan layanan laboratorium yang terstandarisasi KAN 3. Meningkatkan layanan peralatan berat pendukung pembangunan infrastruktur 4. Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Ketiga	2. Meningkatkan layanan laboratorium yang terstandarisasi KAN 3. Meningkatkan layanan peralatan berat pendukung pembangunan infrastruktur 4. Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Ketiga

3.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Adapun Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk yang telah sesuai dengan Operasional NSPK, Arah Kebijakan RPJMD sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003/47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3) Keputusan Bupati Nganjuk No. 188/171/K/411.013/2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten; 4) Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;	1. Penguatan Pondasi Percepatan Pembangunan Daerah 2. Pengelolaan Sektor Strategis Daerah 3. Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat 4. Pemantapan Transformasi Pembangunan	1) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memenuhi standar. 2) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Selingkar Wilis sebagai Kawasan Agropolitan dan Wisata 3) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kawasan Peruntukan Industri dan atau Kawasan Industri serta lokasi rencana eksplorasi sumber daya energi di	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan; 7) Keputusan Gubenur Nomor : 188/207/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer dan Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder Provinsi Jawa Timur.		Kabupaten Nganjuk. 4) Pembangunan jalan poros desa terpencil/ terisolir/ perbatasan. 5) Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.	
2	1. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur		1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi; 6. Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasikompetensi Kerja Konstruksi Dansertifikasi Badan Usaha Jasakonstruksi yang dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.			
	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor		1) Meningkatkan layanan laboratorium yang terstandarisasi KAN	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Standar Pelayanan; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur tentang penerapan standar pelayanan minimal yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah; 5) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05 Tahun 2023 tentang arahan lebih lanjut mengenai standar pelayanan publik terpadu; 6) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.		2) Meningkatkan layanan peralatan berat pendukung pembangunan infrastruktur. 3) Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Ketiga.	
3	1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 mengatur tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).		1) Pelaksanaan pembangunan sambungan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan terlindungi	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	3) Permen PUPR No. 4 Tahun 2020 mengatur tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 4) Permen PUPR No. 5 Tahun 2022 mengatur tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022. 5) Permen PUPR No. 13 Tahun 2023 mengatur tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. 6) SDGs poin 6, yang disebut Air Bersih dan Sanitasi Layak, berfokus pada memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.			
4	1) Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017 mengatur tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. 2) Permen PUPR No. 13 Tahun 2023 mengatur tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. 3) SDGs poin 6, yang disebut Air Bersih dan		1) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi yang aman dan layak	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	Sanitasi Layak, berfokus pada memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. 4) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2 Tahun 2023 membahas tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.			
5	1. Permen PU No. 3 Tahun 2013 mengatur tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		1) Meningkatkan penyediaan infrastruktur persampahan	
6	1) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 23/SE/Db/2021 tentang Pedoman Desain Drainase Jalan (Pedoman Nomor 15/P/BM/2021) 2) Permen Pu No. 12/PRT/M/2014 adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.		1) Meningkatkan sistem drainase terpadu dan terhubung dengan sungai 2) Penggunaan teknologi hijau dan biopori	
7	1) Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung 2) Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/Prt/M/2006 tentang		1) Pemeliharaan fasilitas umum dan bangunan gedung pemerintah yang inklusif 2) Penyediaan sarana bangunan gedung sebagai penunjang pelaksanaan fungsi urusan	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. 4) Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung SNI 2847 : 2019 5) Tata Cara Perencanaan Ketahanan gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung SNI 1726:2019 6) Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur lain SNI 1727:2013 7) Spesifikasi untuk bangunan gedung Baja struktural SNI 1729:2015 8) Baja tulangan beton SNI 2052:2017 9) Peraturan Perburuhan di Indonesia (tentang Pengarahan tenaga Kerja) antara lain tentang larangan mengerjakan anak-anak dibawah umur. 10) Surat keputusan bersama Menteri Tenaga kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.174 MEM/86, tanggal 4 Maret 1986 104/KPCS/1986 11) Standar Nasional Indonesia (SNI) SNI 03-2847-2013; Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. 12) SNI 1726:2012; Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung. 13) SNI 03-686-1-2002; Agregat Beton. 14) SNI-1727-2013-Beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain		pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah 3) Optimalisasi kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	3) PUBI – 1982 Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia			
8	1) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur tentang pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, menjamin hak setiap orang atas air, serta mengatur izin penggunaan air 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2015 mengatur tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi. 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 09/PRT/M/2015 mengatur tentang penggunaan sumber daya air permukaan 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 06/PRT/M/2015 mengatur tentang eksploitasi dan pemeliharaan sumber		1) Melaksanakan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dan prasarana sumber daya air yang memadai guna mendukung swasembada pangan 2) Mengoptimalkan fungsi tampungan air untuk konservasi dan penyediaan air baku irigasi 3) Meningkatkan peran kelembagaan pengelola irigasi, baik dari pemerintah, komisi irigasi, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	daya air dan bangunan pengairan 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 mengatur tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi			
9	1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2022 mengatur tentang penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 mengatur tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan rencana detail tata ruang. 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 mengatur tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi		1) Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 2) Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk mendukung investasi 3) Peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan KKPR dan PBG	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	Program Pemanfaatan Ruang 6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2021 mengatur tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 15 Tahun 2021 mengatur tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 9 Tahun 2022 mengatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 mengatur tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. 9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 mengatur tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).			

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 11) Perda kab. Nganjuk No. 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk tahun 2021 – 2041.			

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program dan Rencana Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Sedangkan Indikator Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Program Perangkat Daerah adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Penyusunan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan ketentuan:

1. Mampu mengatasi permasalahan serta isu strategis daerah.
2. Memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Sebagai operasionalisasi tugas dan fungsi Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk.

Program Unggulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pendukung Visi, Misi dan Program Unggulan Bupati Nganjuk periode 2025-2029 sebagai berikut :

Visi	Misi	Program Unggulan (PU)	Pengampu	Program yang diampu Dinas PUPR	Pendukung	Program yang diampu Dinas PUPR
Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat	(M.3) Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	(PU.1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran	Penyelenggaraan jalan dan pengelolaan SDA	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Keciptakaryaan, bangunan gedung dan penataan ruang (Dinas PUPR)	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Program Penataan Bangunan Gedung 6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program-Program Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pendukung Visi, Misi dan Program Unggulan Bupati Nganjuk periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Penataan Bangunan Gedung

7. Program Penyelenggaraan Jalan
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Daftar Program/ Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional yang telah ditentukan Lokasinya di dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai 1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi 1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa
	Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikulutara	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi 1.03.02.2.02.0054 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan bendungan-bendungan pada DAS-Brantas	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi 1.03.02.2.02.0054 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025-2029 sebagaimana **Tabel IV.1** berikut:

TABEL 4.1 PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					273.700.849.283,34		301.010.934.210		331.052.027.631		364.097.230.395		400.446.953.436	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.485.096.000		35.693.605.600		39.222.966.160		43.105.262.776		47.375.789.054	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75	76	77	32.485.096.000	78	35.693.605.600	79	39.222.966.160	80	43.105.262.776	81	47.375.789.054	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM					22.522.500.000		24.774.750.000		27.252.225.000		29.977.447.500		32.975.192.250	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Persentase sistem pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik (sungai,dam, dll) (%)	76,43	76,93	77,43	11.200.000.000	77,93	12.320.000.000	78,43	13.552.000.000	78,93	14.907.200.000	79,43	16.397.920.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya layanan infrastruktur jaringan irigasi	Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik (%)	75,31	75,36	75,41	11.322.500.000	75,46	12.454.750.000	75,51	13.700.225.000	75,56	15.070.247.500	75,61	16.577.272.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000	
Meningkatnya Pelayanan Air Minum Layak dan Aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatk	97,314	97,334	97,354	2.000.000.000	97,374	2.200.000.000	97,394	2.420.000.000	97,414	2.662.000.000	97,434	2.928.200.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	an akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota (%)													Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					1.500.000.000		1.650.000.000		1.815.000.000		1.996.500.000		2.196.150.000	
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Persampahan	Persentase jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun (%)	70	70,02	70,04	1.500.000.000	70,06	1.650.000.000	70,08	1.815.000.000	70,1	1.996.500.000	70,12	2.196.150.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.100.000.000		1.190.000.000		1.289.000.000		1.397.900.000		1.517.690.000	
Meningkatnya Layanan Sanitasi Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	91,46	91,48	91,5	1.100.000.000	91,52	1.190.000.000	91,54	1.289.000.000	91,56	1.397.900.000	91,58	1.517.690.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					15.200.000.000		16.720.000.000		18.392.000.000		20.231.200.000		22.254.320.000	
Meningkatnya Pelayanan Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	60	60,02	60,04	15.200.000.000	60,06	16.720.000.000	60,08	18.392.000.000	60,1	20.231.200.000	60,12	22.254.320.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM					29.842.302.519		32.826.532.770		36.109.186.047		39.720.104.652		43.692.115.118	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENATAAN BANGUNAN GEDUNG														
Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung Negara	Persentase bangunan gedung negara yang berkualitas (%)	83,33	83,34	83,35	29.842.302.519	83,36	32.826.532.770	83,37	36.109.186.047	83,38	39.720.104.652	83,39	43.692.115.118	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					166.950.950.764,34		183.646.045.840		202.010.650.424		222.211.715.467		244.432.887.014	
Meningkatnya Kualitas Konstruksi Jalan	Persentase panjang jalan yang meningkat kualitas konstruksinya (fleksibel dan rigid pavement) (%)	68,214	70,05	72,35	166.950.950.764,34	74,31	183.646.045.840	76,28	202.010.650.424	78,25	222.211.715.467	80,22	244.432.887.014	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	
Meningkatnya SDM konstruksi yang bersertifikat	Persentase peningkatan jumlah SDM	63,77	64	64,3	100.000.000	64,35	110.000.000	64,4	121.000.000	64,45	133.100.000	64,5	146.410.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	konstruksi yang bersertifikat (%)													Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000	
Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	100	1.331.000.000	100	1.464.100.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen KKPR yang di keluarkan (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	100	1.331.000.000	100	1.464.100.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
TOTAL KESELURUHAN					**273.700.849.283,34**		**301.010.934.210,00**		**331.052.027.631.00**		**364.097.230.395,00**		**400.446.953.436,00**	

TABEL 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang handal	Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Yang Berkualitas				Indeks pekerjaan umum dan tata ruang		
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan			Persentase Jalan dalam kondisi mantap		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, IK: Nilai SAKIP PerangkatÂ Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Yang Sesuai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya kegiatan peningkatan kepegawaian Yang Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Konstruksi Jalan		Persentase panjang jalan yang meningkat kualitas konstruksinya (fleksibel dan rigid pavement)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan / Pendataan Database Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terjaganya Lapisan Permukaan Jalan dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terpeliharanya Jembatan dalam kondisi baik	Panjang jembatan yang dilebarkan	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang jembatan yang dibangun	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang jembatan yang dibangun	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang jembatan yang dilebarkan	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya SDM konstruksi yang bersertifikat		Persentase peningkatan jumlah SDM konstruksi yang bersertifikat	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Tersedianya SDM Konstruksi Kompeten	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Daerah Irigasi			Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		
			Meningkatnya layanan infrastruktur jaringan irigasi		Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Terwujudnya Jaringan Irigasi Yang Berkualitas	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Operasional kelembagaan pengelola irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya air		Persentase sistem pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik (sungai,dam, dll)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya normalisasi / restorisasi sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Keciptakaryaan			Persentase pemenuhan infrastruktur keciptakaryaan sesuai standar teknis		
			Meningkatnya Pelayanan Drainase		Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Tersedianya Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terpeliharanya Aliran Drainase Secara Optimal	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung Negara		Persentase bangunan gedung negara yang berkualitas	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Terwujudnya Infrastruktur Gedung Negara Yang Berkualitas	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
				Terlaksananya Perencanaan Bangunan Gedung Negara dan Fasilitas Umum	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			Meningkatnya Layanan Sanitasi Layak		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Terpenuhinya Sistem Air Limbah Domestik Skala Rumah Tangga	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Sistem, Tata Kelola dan Pemeliharaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya jasa pengelolaan limbah	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelayanan Air Minum Layak dan Aman		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Tersedianya dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya sarana dan prasarana SPAM	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pengelolaan SPAM	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Persampahan		Persentase jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Tersusunnya dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya infrastruktur persampahan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas penataan ruang			Persentase penataan ruang sesuai dengan RTRW		
			Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang Yang Berkualitas	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				273.700.849.283,34		301.010.934.210		331.052.027.631		364.097.230.395		400.446.953.436		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				32.485.096.000		35.693.605.600		39.222.966.160		43.105.262.776		47.375.789.054		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75	77	32.485.096.000	78	35.693.605.600	79	39.222.966.160	80	43.105.262.776	81	47.375.789.054	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3	3	150.000.000	3	165.000.000	3	181.500.000	3	199.650.000	3	219.615.000		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	20.000.000	3	22.000.000	3	24.200.000	3	26.620.000	3	29.282.000		
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3	20.000.000	3	22.000.000	3	24.200.000	3	26.620.000	3	29.282.000		
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3	3	20.000.000	3	22.000.000	3	24.200.000	3	26.620.000	3	29.282.000		
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	3	20.000.000	3	22.000.000	3	24.200.000	3	26.620.000	3	29.282.000		
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	3	20.000.000	3	22.000.000	3	24.200.000	3	26.620.000	3	29.282.000		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.300.000	2	39.930.000	2	43.923.000		
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.200.000	4	26.620.000	4	29.282.000		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.135.000.000		24.348.500.000		26.783.350.000		29.461.685.000		32.407.853.500		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	151	171	22.000.000.000	171	24.200.000.000	171	26.620.000.000	171	29.282.000.000	171	32.210.200.000		
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.000.000.000		24.200.000.000		26.620.000.000		29.282.000.000		32.210.200.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	151	171	22.000.000.000	171	24.200.000.000	171	26.620.000.000	171	29.282.000.000	171	32.210.200.000		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	36	135.000.000	36	148.500.000	36	163.350.000	36	179.685.000	36	197.653.500		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	36	20.000.000	36	22.000.000	36	24.200.000	36	26.620.000	36	29.282.000		
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	60.000.000	2	66.000.000	2	72.600.000	2	79.860.000	2	87.846.000		
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		80.525.500		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	6	55.000.000	6	60.500.000	6	66.550.000	6	73.205.000	6	80.525.500		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		483.153.000		
Terlaksananya kegiatan peningkatan kepegawaian Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	151	171	180.000.000	171	198.000.000	171	217.800.000	171	239.580.000	171	263.538.000		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	38		40		43		45		48			
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				135.000.000		148.500.000		163.350.000		179.685.000		197.653.500		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	38	135.000.000	40	148.500.000	43	163.350.000	45	179.685.000	48	197.653.500		
1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45.000.000		49.500.000		54.450.000		59.895.000		65.884.500		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	151	171	45.000.000	171	49.500.000	171	54.450.000	171	59.895.000	171	65.884.500		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Yang Sesuai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	171	171	150.000.000	171	165.000.000	171	181.500.000	171	199.650.000	171	219.615.000		
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	171	171	150.000.000	171	165.000.000	171	181.500.000	171	199.650.000	171	219.615.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.685.096.000		1.853.605.600		2.038.966.160		2.242.862.776		2.467.149.054		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	73	82	765.000.000	85	841.500.000	87	925.650.000	90	1.018.215.000	95	1.120.036.500		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	108	112		114		116		118		120			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	33	37		40		43		45		50			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	36	43		45		48		50		53			
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		51243.500		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	33	37	35.000.000	40	38.500.000	43	42.350.000	45	46.585.000	50	51243.500		
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		117.128.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	108	112	80.000.000	114	88.000.000	116	96.800.000	118	106.480.000	120	117.128.000		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				600.000.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000		878.460.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	36	43	600.000.000	45	660.000.000	48	726.000.000	50	798.600.000	53	878.460.000		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	73	82	50.000.000	85	55.000.000	87	60.500.000	90	66.550.000	95	73.205.000		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	920.096.000	12	1.012.105.600	12	1.113.316.160	12	1.224.647.776	12	1.347.112.554		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	33	33		33		33		33		33			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65	70		70		70		70		70			
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	60.000.000	12	66.000.000	12	72.600.000	12	79.860.000	12	87.846.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		1.024.870.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65	70	700.000.000	70	770.000.000	70	847.000.000	70	931.700.000	70	1.024.870.000		
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	33	33	50.000.000	33	55.000.000	33	60.500.000	33	66.550.000	33	73.205.000		
1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				110.096.000		121.105.600		133.216.160		146.537.776		161.191.554		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	4	110.096.000	4	121.105.600	4	133.216.160	4	146.537.776	4	161.191.554		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.050.000.000		4.415.000.000		4.816.500.000		5.258.150.000		5.743965.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	40	44	4.050.000.000	46	4.415.000.000	48	4.816.500.000	50	5.258.150.000	52	5.743965.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35	40		43		45		48		50			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	2	1		1		1		1		1			
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000		
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				3.000.000.000		3.300.000.000		3.630.000.000		3.993.000.000		4.392.300.000		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	2	1	3.000.000.000	1	3.300.000.000	1	3.630.000.000	1	3.993.000.000	1	4.392.300.000		
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	40	44	150.000.000	46	165.000.000	48	181.500.000	50	199.650.000	52	219.615.000		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35	40	500.000.000	43	550.000.000	45	605.000.000	48	665.500.000	50	732.050.000		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				765.000.000		841.500.000		925.650.000		1.018.215.000		1.120.036.500		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	765.000.000	12	841.500.000	12	925.650.000	12	1.018.215.000	12	1.120.036.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	18	21		22		23		24		25			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.320.500		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	18	21	5.000.000	22	5.500.000	23	6.050.000	24	6.655.000	25	7.320.500		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600.000.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000		878.460.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	600.000.000	12	660.000.000	12	726.000.000	12	798.600.000	12	878.460.000		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				160.000.000		176.000.000		193.600.000		212.960.000		234.256.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	160.000.000	4	176.000.000	4	193.600.000	4	212.960.000	4	234.256.000		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.370.000.000		3.707.000.000		4.077.700.000		4.485.470.000		4.934.017.000		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	27	29	3.370.000.000	30	3.707.000.000	31	4.077.700.000	32	4.485.470.000	33	4.934.017.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	42	44		45		46		47		48			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	115	120		123		125		128		130			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15		15		15		15		15			
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		1.024.870.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	115	120	700.000.000	123	770.000.000	125	847.000.000	128	931.700.000	130	1.024.870.000		
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	27	29	1.000.000.000	30	1.100.000.000	31	1.210.000.000	32	1.331.000.000	33	1.464.100.000		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				170.000.000		187.000.000		205.700.000		226.270.000		248.897.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	42	44	170.000.000	45	187.000.000	46	205.700.000	47	226.270.000	48	248.897.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.500.000.000		1.650.000.000		1.815.000.000		1.996.500.000		2.196.150.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15	1.500.000.000	15	1.650.000.000	15	1.815.000.000	15	1.996.500.000	15	2.196.150.000		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				22.522.500.000		24.774.750.000		27.252.225.000		29.977.447.500		32.975.192.250		
Meningkatnya layanan infrastruktur jaringan irigasi	Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik (%)	75,31	75,41	11.322.500.000	75,46	12.454.750.000	75,51	13.700.225.000	75,56	15.070.247.500	75,61	16.577.272.250	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				11.322.500.000		12.454.750.000		13.700.225.000		15.070.247.500		16.577.272.250		
Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)	3	3	5.200.000.000	3	5.720.000.000	3	6.292.000.000	3	6.921.200.000	3	7.613.320.000		
	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	3	2		2		2		2		2			
1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi				2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000		
Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	3	2	2.000.000.000	2	2.200.000.000	2	2.420.000.000	2	2.662.000.000	2	2.928.200.000		
1.03.02.2.02.0054 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi				3.200.000.000		3.520.000.000		3.872.000.000		4.259.200.000		4.685.120.000		
Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)	3	3	3.200.000.000	3	3.520.000.000	3	3.872.000.000	3	4.259.200.000	3	4.685.120.000		
Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	6,15	6,17	5.472.500.000	6,2	6.019.750.000	6,25	6.621.725.000	6,28	7.283.897.500	6,3	8.012.287.250		
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	400,401	400,401		400,401		400,401		400,401		400,401			
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				1.950.000.000		2.145.000.000		2.359.500.000		2.595.450.000		2.854.995.000		
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	6,15	6,17	1.950.000.000	6,2	2.145.000.000	6,25	2.359.500.000	6,28	2.595.450.000	6,3	2.854.995.000		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				3.522.500.000		3.874.750.000		4.262.225.000		4.688.447.500		5.157.292.250		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	400,401	400,401	3.522.500.000	400,401	3.874.750.000	400,401	4.262.225.000	400,401	4.688.447.500	400,401	5.157.292.250		
Tersedianya dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000		
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Operasional kelembagaan pengelola irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	5	5	600.000.000	5	660.000.000	5	726.000.000	5	798.600.000	5	878.460.000		
1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi				600.000.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000		878.460.000		
Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	5	5	600.000.000	5	660.000.000	5	726.000.000	5	798.600.000	5	878.460.000		
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Persentase sistem pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik (sungai,dam, dll) (%)	76,43	77,43	11.200.000.000	77,93	12.320.000.000	78,43	13.552.000.000	78,93	14.907.200.000	79,43	16.397.920.000		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				11.200.000.000		12.320.000.000		13.552.000.000		14.907.200.000		16.397.920.000		
Terlaksananya normalisasi / restorisasi sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	15,54	15,7	8.500.000.000	15,8	9.350.000.000	15,9	10.285.000.000	16	11.313.500.000	16,1	12.444.850.000		
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				8.500.000.000		9.350.000.000		10.285.000.000		11.313.500.000		12.444.850.000		
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	15,54	15,7	8.500.000.000	15,8	9.350.000.000	15,9	10.285.000.000	16	11.313.500.000	16,1	12.444.850.000		
Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	28	28	2.600.000.000	28	2.860.000.000	28	3.146.000.000	28	3.460.600.000	28	3.806.660.000		
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				2.600.000.000		2.860.000.000		3.146.000.000		3.460.600.000		3.806.660.000		
Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	28	28	2.600.000.000	28	2.860.000.000	28	3.146.000.000	28	3.460.600.000	28	3.806.660.000		
Tersedianya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000		
1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000		
Meningkatnya Pelayanan Air Minum Layak dan Aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	97,314	97,354	2.000.000.000	97,374	2.200.000.000	97,394	2.420.000.000	97,414	2.662.000.000	97,434	2.928.200.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	4	4	700.000.000	4	770.000.000	4	847.000.000	4	931.700.000	4	1.024.870.000		
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		1.024.870.000		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	4	4	700.000.000	4	770.000.000	4	847.000.000	4	931.700.000	4	1.024.870.000		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	9	11	300.000.000	12	330.000.000	13	363.000.000	14	399.300.000	15	439.230.000		
1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa				300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		
Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	9	11	300.000.000	12	330.000.000	13	363.000.000	14	399.300.000	15	439.230.000		
Terlaksananya Pengelolaan SPAM	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	-	4	500.000.000	4	550.000.000	4	605.000.000	4	665.500.000	4	732.050.000		
1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	-	4	500.000.000	4	550.000.000	4	605.000.000	4	665.500.000	4	732.050.000		
Tersedianya dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	5	5	200.000.000	5	220.000.000	5	242.000.000	5	266.200.000	5	292.820.000		
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	5	5	200.000.000	5	220.000.000	5	242.000.000	5	266.200.000	5	292.820.000		
Tersedianya sarana dan prasarana SPAM	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	186	190	300.000.000	192	330.000.000	194	363.000.000	196	399.300.000	198	439.230.000		
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	186	190	300.000.000	192	330.000.000	194	363.000.000	196	399.300.000	198	439.230.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				1.500.000.000		1.650.000.000		1.815.000.000		1.996.500.000		2.196.150.000		
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Persampahan	Persentase jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun (%)	70	70,04	1.500.000.000	70,06	1.650.000.000	70,08	1.815.000.000	70,1	1.996.500.000	70,12	2.196.150.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				1.500.000.000		1.650.000.000		1.815.000.000		1.996.500.000		2.196.150.000		
Terlaksananya Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	3	3	400.000.000	3	440.000.000	3	484.000.000	3	532.400.000	3	585.640.000		
1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000		
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	3	3	400.000.000	3	440.000.000	3	484.000.000	3	532.400.000	3	585.640.000		
Terpenuhinya infrastruktur persampahan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	2,02	2,1	1.000.000.000	2,12	1.100.000.000	2,15	1.210.000.000	2,18	1.331.000.000	2,22	1.464.100.000		
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	2,02	2,1	1.000.000.000	2,12	1.100.000.000	2,15	1.210.000.000	2,18	1.331.000.000	2,22	1.464.100.000		
Tersusunnya dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	3	3	100.000.000	3	110.000.000	3	121.000.000	3	133.100.000	3	146.410.000		
1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	3	3	100.000.000	3	110.000.000	3	121.000.000	3	133.100.000	3	146.410.000		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1.100.000.000		1.190.000.000		1.289.000.000		1.397.900.000		1.517.690.000		
Meningkatnya Layanan Sanitasi Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	91,46	91,5	1.100.000.000	91,52	1.190.000.000	91,54	1.289.000.000	91,56	1.397.900.000	91,58	1.517.690.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.100.000.000		1.190.000.000		1.289.000.000		1.397.900.000		1.517.690.000		
Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	150	158	20.000.000	160	22.000.000	162	24.200.000	164	26.620.000	166	29.282.000		
1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	150	158	20.000.000	160	22.000.000	162	24.200.000	164	26.620.000	166	29.282.000		
Terlaksananya Sistem, Tata Kelola dan Pemeliharaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	-	80	100.000.000	80	110.000.000	80	121.000.000	80	133.100.000	80	146.410.000		
1.03.05.2.01.0026 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	-	80	100.000.000	80	110.000.000	80	121.000.000	80	133.100.000	80	146.410.000		
Terpenuhinya Sistem Air Limbah Domestik Skala Rumah Tangga	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)	-	10	500.000.000	10	530.000.000	10	563.000.000	10	599.300.000	10	639.230.000		
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari)	-	10		11		12		13		14			
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari)	-	10	300.000.000	11	330.000.000	12	363.000.000	13	399.300.000	14	439.230.000		
1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)	-	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000		
Tersedianya jasa pengelolaan limbah	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	25	25	380.000.000	25	418.000.000	25	459.800.000	25	505.780.000	25	556.358.000		
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.187	1.192		1.194		1.196		1.198		1.200			
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	25	25	50.000.000	25	55.000.000	25	60.500.000	25	66.550.000	25	73.205.000		
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		483.153.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.187	1.192	330.000.000	1.194	363.000.000	1.196	399.300.000	1.198	439.230.000	1.200	483.153.000		
Tersusunnya dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000		
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				15.200.000.000		16.720.000.000		18.392.000.000		20.231.200.000		22.254320.000		
Meningkatnya Pelayanan Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	60	60,04	15.200.000.000	60,06	16.720.000.000	60,08	18.392.000.000	60,1	20.231.200.000	60,12	22.254320.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.200.000.000		16.720.000.000		18.392.000.000		20.231.200.000		22.254320.000		
Terpeliharanya Aliran Drainase Secara Optimal	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	11	13	13.500.000.000	14	14.850.000.000	15	16.335.000.000	16	17.968.500.000	17	19.765350.000		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	18	21		22		23		24		25			
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	15	17		18		19		20		21			
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	2	2				2		2		2			
1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan				500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	2	2	500.000.000		550.000.000	2	605.000.000	2	665.500.000	2	732.050.000		
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000		
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	11	13	2.000.000.000	14	2.200.000.000	15	2.420.000.000	16	2.662.000.000	17	2.928.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				10.000.000.000		11.000.000.000		12.100.000.000		13.310.000.000		14.641.000.000		
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	18	21	10.000.000.000	22	11.000.000.000	23	12.100.000.000	24	13.310.000.000	25	14.641.000.000		
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	15	17	1.000.000.000	18	1.100.000.000	19	1.210.000.000	20	1.331.000.000	21	1.464.100.000		
Tersedianya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	35	35	200.000.000	35	220.000.000	35	242.000.000	35	266.200.000	35	292.820.000		
1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	35	35	200.000.000	35	220.000.000	35	242.000.000	35	266.200.000	35	292.820.000		
Tersedianya Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	3.381	3.400	1.500.000.000	3.410	1.650.000.000	3.420	1.815.000.000	3.430	1.996.500.000	3.440	2.196.150.000		
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				1.500.000.000		1.650.000.000		1.815.000.000		1.996.500.000		2.196.150.000		
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	3.381	3.400	1.500.000.000	3.410	1.650.000.000	3.420	1.815.000.000	3.430	1.996.500.000	3.440	2.196.150.000		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				29.842.302.519		32.826.532.770		36.109.186.047		39.720.104.652		43.692.115.118		
Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung Negara	Persentase bangunan gedung negara yang berkualitas (%)	83,33	83,35	29.842.302.519	83,36	32.826.532.770	83,37	36.109.186.047	83,38	39.720.104.652	83,39	43.692.115.118	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				29.842.302.519		32.826.532.770		36.109.186.047		39.720.104.652		43.692.115.118		
Terlaksananya Perencanaan Bangunan Gedung Negara dan Fasilitas Umum	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	18	18	26.842.302.519	18	29.526.532.770	18	32.479.186.047	18	35.727.104.652	18	39.299.815.118		
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				26.842.302.519		29.526.532.770		32.479.186.047		35.727.104.652		39.299.815.118		
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	18	18	26.842.302.519	18	29.526.532.770	18	32.479.186.047	18	35.727.104.652	18	39.299.815.118		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Infrastruktur Gedung Negara Yang Berkualitas	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	97	98	3.000.000.000	98	3.300.000.000	98	3.630.000.000	98	3.993.000.000	98	4.392.300.000		
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3.000.000.000		3.300.000.000		3.630.000.000		3.993.000.000		4.392.300.000		
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	97	98	3.000.000.000	98	3.300.000.000	98	3.630.000.000	98	3.993.000.000	98	4.392.300.000		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				166.950.950.764,34		183.646.045.840		202.010.650.424		222.211.715.467		244.432.887.014		
Meningkatnya Kualitas Konstruksi Jalan	Persentase panjang jalan yang meningkat kualitas konstruksinya (fleksibel dan rigid pavement) (%)	68,214	72,35	166.950.950.764,34	74,31	183.646.045.840	76,28	202.010.650.424	78,25	222.211.715.467	80,22	244.432.887.014	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				166.950.950.764,34		183.646.045.840		202.010.650.424		222.211.715.467		244.432.887.014		
Terjaganya Lapisan Permukaan Jalan dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	48	52	131.503.126.625,34	52,75	144.653.439.287	53,18	159.118.783.216	54,2	175.030.661.538	56,25	192.533.727.692		
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	37,09	37,95		38,05		38,16		38,3		38,43			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	39	39,25		39,35		39,48		39,75		39,95			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	16,06	16,24		16,35		16,45		16,56		16,76			
	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (KM)	2,97	3,6		3,85		3,96		4,1		4,14			
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	35	39		41		43		45		47			
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.481,997	1.475,023		1.475,023		1.475,023		1.475,023		1.475,023			
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.481,997	1.475,023	1.000.000.000	1.475,023	1.100.000.000	1.475,023	1.210.000.000	1.475,023	1.331.000.000	1.475,023	1.464.100.000		
1.03.10.2.01.0050 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur				4.500.000.000		4.950.000.000		5.445.000.000		5.989.500.000		6.588.450.000		
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (KM)	2,97	3,6	4.500.000.000	3,85	4.950.000.000	3,96	5.445.000.000	4,1	5.989.500.000	4,14	6.588.450.000		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				15.000.000.000		16.500.000.000		18.150.000.000		19.965.000.000		21.961.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	39	39,25	15.000.000.000	39,35	16.500.000.000	39,48	18.150.000.000	39,75	19.965.000.000	39,95	21.961.500.000		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				31.000.000.000		34.100.000.000		37.510.000.000		41.261.000.000		45.387.100.000		
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	35	39	31.000.000.000	41	34.100.000.000	43	37.510.000.000	45	41.261.000.000	47	45.387.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				53.003.126.625,34		58.303.439.287		64.133.783.216		70.547.161.538		77.601.877.692		
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	37,09	37,95	53.003.126.625,34	38,05	58.303.439.287	38,16	64.133.783.216	38,3	70.547.161.538	38,43	77.601.877.692		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				11.000.000.000		12.100.000.000		13.310.000.000		14.641.000.000		16.105.100.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	16,06	16,24	11.000.000.000	16,35	12.100.000.000	16,45	13.310.000.000	16,56	14.641.000.000	16,76	16.105.100.000		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				16.000.000.000		17.600.000.000		19.360.000.000		21.296.000.000		23.425.600.000		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	48	52	16.000.000.000	52,75	17.600.000.000	53,18	19.360.000.000	54,2	21.296.000.000	56,25	23.425.600.000		
Terpeliharanya Jembatan dalam kondisi baik	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	4	1	32.947.824.139	1	36.242.606.553	1	39.866.867.208	1	43.853.553.929	1	48.238.909.322		
	Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	2	1		1		1		1		1			
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	5	5		5		5		5		5			
1.03.10.2.01.0049 - Pelebaran Jembatan				9.000.000.000		9.900.000.000		10.890.000.000		11.979.000.000		13.176.900.000		
Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	2	1	9.000.000.000	1	9.900.000.000	1	10.890.000.000	1	11.979.000.000	1	13.176.900.000		
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				7.647.824.139		8.412.606.553		9.253.867.208		10.179.253.929		11.197.179.322		
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1	1	7.647.824.139	1	8.412.606.553	1	9.253.867.208	1	10.179.253.929	1	11.197.179.322		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				5.300.000.000		5.830.000.000		6.413.000.000		7.054.300.000		7.759.730.000		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	5	5	5.300.000.000	5	5.830.000.000	5	6.413.000.000	5	7.054.300.000	5	7.759.730.000		
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				11.000.000.000		12.100.000.000		13.310.000.000		14.641.000.000		16.105.100.000		
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	4	1	11.000.000.000	1	12.100.000.000	1	13.310.000.000	1	14.641.000.000	1	16.105.100.000		
Tersedianya Dokumen Perencanaan / Pendataan Database Jalan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	11	12	2.500.000.000	12	2.750.000.000	12	3.025.000.000	12	3.327.500.000	12	3.660.250.000		
	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan				500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	2	2	500.000.000	2	550.000.000	2	605.000.000	2	665.500.000	2	732.050.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	11	12	2.000.000.000	12	2.200.000.000	12	2.420.000.000	12	2.662.000.000	12	2.928.200.000		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Meningkatnya SDM konstruksi yang bersertifikat	Persentase peningkatan jumlah SDM konstruksi yang bersertifikat (%)	63,77	64,3	100.000.000	64,35	110.000.000	64,4	121.000.000	64,45	133.100.000	64,5	146.410.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Tersedianya SDM Konstruksi Kompeten	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	167	60	100.000.000	60	110.000.000	60	121.000.000	60	133.100.000	60	146.410.000		
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	167	60	100.000.000	60	110.000.000	60	121.000.000	60	133.100.000	60	146.410.000		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000		
Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW (%)	100	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	100	1.331.000.000	100	1.464.100.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		
Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang Yang Berkualitas	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.210.000.000	1	1.331.000.000	1	1.464.100.000		
	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000	1	665.500.000	1	732.050.000		
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000	1	665.500.000	1	732.050.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen KKPR yang di keluarkan (%)	100	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	100	1.331.000.000	100	1.464.100.000		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		
Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	65	66	1.000.000.000	67	1.100.000.000	68	1.210.000.000	69	1.331.000.000	70	1.464.100.000		
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	65	66	1.000.000.000	67	1.100.000.000	68	1.210.000.000	69	1.331.000.000	70	1.464.100.000		

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya layanan infrastruktur jaringan irigasi	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
			1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
			1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
		Meningkatnya layanan infrastruktur jaringan irigasi	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	
			1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
			1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi	
			1.03.02.2.02.0054 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
2.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Pelayanan Air Minum Layak dan Aman	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	
			1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
3.	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Persampahan	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
			1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
4.	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Layanan Sanitasi Layak	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
			1.03.05.2.01.0026 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
			1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	
			1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
5.	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Pelayanan Drainase	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	

6

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
6.	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung Negara	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
7.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Kualitas Konstruksi Jalan	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan	
			1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			1.03.10.2.01.0049 - Pelebaran Jembatan	
			1.03.10.2.01.0050 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur	
			1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
			1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
			1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
			1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
			1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	
			1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	
8.	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya SDM konstruksi yang bersertifikat	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
			1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
9.	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis tahun 2025-2029 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yaitu **"Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas"** dengan sasaran **"Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan, Meningkatnya Kinerja Layanan Daerah Irigasi, Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang"**. Indikator kinerja utama yang ditetapkan yaitu **"Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang".**

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh dinas yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam menyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun dinas didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya :

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran
2. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas. Dalam hal ini base line capaian pada tahun 2024 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2025-2029.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja akan menunjukkan tingkat pencapaian atau realisasi setiap tahun berdasarkan target tahunan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
2.	Indeks pekerjaan umum dan tata ruang	Indeks	75,08	75,69	76,4	77,02	77,66	78,3	78,93	
3.	Persentase penataan ruang sesuai dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	%	68,214	70,05	72,35	74,31	76,28	78,25	80,22	
5.	Persentase pemenuhan infrastruktur keciptakaryaan sesuai standar teknis	%	80,42	80,44	80,46	80,47	80,49	80,51	80,53	
6.	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	75,31	75,36	75,41	75,46	75,51	75,56	75,61	
7.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	76,43	76,93	77,43	77,93	78,43	78,93	79,43	

4.4 Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicators* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Setelah organisasi menganalisis misinya, mengidentifikasi semua pemangku kepentingan, dan menentukan tujuan-tujuan, maka membutuhkan cara untuk mengukur capaian-capaian yang telah dilakukan, dan pengukuran itu adalah KPI.

KPI mencerminkan tujuan-tujuan organisasi, menjadi kunci kesuksesan organisasi, dan oleh karenanya KPI harus dapat diukur. Biasanya KPI dipertimbangkan untuk jangka panjang. Definisi apanya KPI dan bagaimana mengukurnya tidak terlalu sering berubah. Tetapi tujuan-tujuan jangka pendek dibuat dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang. Seberapa besar pencapaian KPI tergantung ukuran yang ditentukan. Indikator Kinerja Kunci bisa dilihat sebagai berikut:

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
2.	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	positif	%	75,31	75,36	75,41	75,46	75,51	75,56	75,61	
3.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	positif	%	76,43	76,93	77,43	77,93	78,43	78,93	79,43	
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	positif	%	91,46	91,48	91,5	91,52	91,54	91,56	91,58	
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	positif	%	97,314	97,334	97,354	97,374	97,394	97,414	97,434	
6.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	positif	%	68,214	70,05	72,35	74,31	76,28	78,25	80,22	
9.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001